

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2023 ini kita telah memasuki era modern, pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyedia jasa layanan publik tersebut. Sebagai penggerak dan pengatur jalannya roda pemerintahan maka harus selalu bergerak ke arah modernisasi. Dalam rangka meningkatkan perbaikan pelayanan publik, Pemerintah menerapkan system desentralisasi di Negara Indonesia. Undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan telah menjadi acuan kerja program penyelenggaraan pemerintah pusat maupun daerah. Diharapkan melewati sistem desentralisasi ini proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi mandiri dan dapat berkembang dengan mengedepankan revormasi birokrasi pada pemerintahan masing-masing daerah.

Undang-undang Otonomi Daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab mengatur pemerintahan dengan sangat leluasa, Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan publik sendiri yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dengan memperhatikan aturan-aturan ataupun regulasi yang telah ditentukan dari Pemerintah Pusat, termasuk mengatur pariwisata di daerah masing- masing.

Kebijakan pengembangan pariwisata ini mampu menjadi penggerak pada berbagai macam sektor, baik dari sektor pendapatn daerah, sektor ekonomi, sektor penyerapan lapangan kerja, sektor pemberdayaan masyarakat, pengasil devisa,

sektor wirausaha dan tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, sektor pariwisata menjadi salah satu modal unggulan utamanya dalam mendorong perekonomian, terlebih lagi di Negara Indonesia, kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, letak geografis yang sangat diuntungkan dengan 17.508 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan dinobatkan sebagai negara Maritim terbesar di Dunia, Negara Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi penyangga sektor wisata Dunia. Oleh karena itu saat ini telah banyak pihak menyadari betapa potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki Negara Indonesia dalam sektor pariwisata. Terlebih lagi tahun-tahun ini ternyata catatan pertumbuhan pariwisata di Indonesia melampaui Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, hal ini berarti sektor pariwisata di Indonesia dapat menjadi Prioritas utama agar dapat tereksplorasi secara maksimal.

Sektor Pariwisata di Negara Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Indonesia didukung oleh sumber daya alam yang sangat indah dan beragam, begitu juga selain alam Indonesia memiliki budaya, seni, adat istiadat, sejarah-sejarah yang sangat menarik dan memiliki tingkat history yang sangat kuat dari peradaban-peradaban kuno, dimulai dari agama dan berbagai macam penyebaran peradaban dunia. Bahkan dulu kala nenek moyang Negara Indonesia terkenal dengan Pelaut, hal ini menjelaskan bahwa dari dulu kala Peradaban di negara Indonesia sangat kental dengan nilai-nilai history. Sampai saat ini banyak wisata-wisata di Indonesia telah dikenal Dunia, bahkan beberapa Destinasi Wisata Di Indonesia telah mendapatkan penghargaan di tingkat Dunia. Tentu hal ini akan

sangat berpengaruh besar bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan menjadi kunci bahwa pentingnya pariwisata di negara ini.

Kementrian Pariwisata Republik Indonesia mengembangkan kepariwisataan Nasional melalui 4 pilar utama yaitu : pengembangan destinasi wisata, industry, pemasaran dan kelembagaan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 dan Rencana Strategi Kementrian Pariwisata Republik Indonesia. Pada sektor pengembangan destinasi wisata tolok ukurnya adalah bagaimana pemerintah dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan, serta memudahkan akses para wisatawan untuk berkunjung ke wisata manapun di Negara ini. Sehingga perlu peningkatan sarana prasarana seperti alat transportasi, penyediaan fasilitas umum, dan sarana-prasarana lainnya.

Sektor kepariwisataan memiliki kontribusi pada PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional dan sebagai penyumbang devisa yang cukup besar untuk Negara ini. Jumlah yang telah didapatkan dari sektor Devisa tidak dapat dianggap biasa saja, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Capaian Devisa dari Sektor Pariwisata

Tahun	Capaian (Triliun Rp)	Kontribusi pada PDB Nasional
2015	175.71	4,25%
2016	176.23	4,13%
2017	198,89	4,11%
2018	229,50	5,25%
2019	280	5,5%

Sumber: (Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi nyata terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Begitu besarnya kontribusi sektor pariwisata merupakan sebuah fakta bahwa pemerintah harus memiliki keseriusan yang kuat untuk mengembangkan sektor pariwisata untuk menambah Devisa Negara. Tentu ini juga menjadi tugas yang berat karena sektor pariwisata di Negara ini sangat beragam, begitu banyaknya budaya dan ke khas an yang harus dapat diperhatikan secara menyeluruh. Selain pentingnya pariwisata bagi devisa negara, pariwisata juga termasuk ke dalam fokus sasaran

Gambar 1. 1
Sustainable Development Goals (SDGs)



Sustainable Development Goals (SDGs).

Sumber : (Website Bappenas RI, 2022)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang terdiri dari 17 poin utama yaitu yang pertama Tanpa Kemiskinan, kedua Tanpa Kelaparan, ketiga Kehidupan Sehat dan Sejahtera, keempat Pendidikan

Berkualitas, kelima Kesenjangan Gender, keenam Air Bersih dan Sanitasi Layak, ketujuh Energi Bersih dan Terjangkau, kedelapan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, kesembilan Industri, Inovasi dan Infrastruktur, kesepuluh Berkurangnya Kesenjangan, kesebelas Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, keduabelas Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, ketigabelas Penanganan Perubahan Iklim, keempatbelas Ekosistem Lautan, kelimabelas Ekosistem Daratan, keenambelas Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan yang terakhir ketujuhbelas Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Konsep pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* adalah pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka Panjang baik itu kepada sosial, lingkungan, budaya dan ekonomi untuk masa kini hingga masa depan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung, maka pada pandangan SDGs memiliki 4 pilar penting untuk mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan upaya dari seluruh pihak, baik Pemerintah, masyarakat, maupun swasta. 4 pilar tersebut meliputi : Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, kemudian Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Hukum dan Tata Kelola (budaya). Pengembangan sektor pariwisata seharusnya dilaksanakan dengan optimal, memiliki tujuan serta profesionalitas agar tercapainya sebuah pembangunan serta pemanfaatan sektor pariwisata yang secara makro akan berdampak dan berkontribusi pada perekonomian daerah.

Kementrian Pariwisata saat ini juga telah merumuskan destinasi-destinasi wisata unggulan dan prioritas yang disebut dengan 10 Destinasi Wisata Prioritas

dan Strategis. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka percepatan pengembangan sektor pariwisata Nasional untuk dapat ambil peran dalam peningkatan Devisa Negara. 10 Wisata unggulan tersebut antara lain tercantum dalam tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Proyeksi 10 Destinasi Prioritas Pengembangan Pariwisata Nasional

No	Destinasi	Proyeksi Tahun 2019	
		Wisman	Devisa (US\$ Million)
1	Borubudur	2.000.000	2.000
2	Mandalika	1.000.000	1.000
3	Labuan Bajo	500.000	500
4	Bromo Tengger Semeru	1.000.000	1.000
5	Kepulauan Seribu	500.000	500
6	Toba	1.000.000	1.000
7	Wakatobi	500.000	500
8	Tanjung Lesung	1.000.000	1.000
9	Morotai	500.000	500
10	Tanjung Kelayang	500.000	500
Jumlah		8.500.000	8.500

Sumber : Kemenpar, 2020

10 Destinasi unggulan Pemerintah pusat saat ini telah mencapai kunjungan wisatawan sebesar 8,5 juta orang yang pada awalnya dapat ditarget 20 juta pengunjung di tahun 2020. Tentu target ini tidak akan mudah untuk dicapai, perlu kerja keras dan kerja sama dengan seluruh pihak agar target ini tercapai, hal mendasar yang akan menjadi hambatan tentu adalah kualitas infrastruktur, perizinan, dan pastinya adalah kendala anggaran. Dalam kurun waktu 5 tahun pemerintah harus ekstra mencari cara untuk mengatasi kendala tersebut untuk mencapai target kenaikan jumlah wisatawan 1.800 persen. Citacita ini harus tetap dikobarkan untuk mencapai target pendapatan devisa sebesar 8.500 juta dolar USA.

Sektor pariwisata di Republik Indonesia harus terus di galakkan, karena kita ingin sektor pariwisata kedepan menjadi sumber devisa tertinggi Negara ini selain Pajak dan Migas. Negara Indonesia saat ini sedang focus untuk mempromosikan berbagai macam destinasi wisata agar dapat dilirik oleh wisatawan asing. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan kepada para wisatawan asing bahwa Indonesia siap untuk bersaing dengan negara lain dalam sektor Pariwisata. Kementrian Pariwisata juga genjar untuk mengadakan event promosi baik di dalam maupun di luar negeri, tujuannya untuk mendongkrak kegiatan kepariwisataan yang ada di dalam negeri agar bursa-bursa investasi kepariwisataan dapat selalu menggeliat dan eksis.

Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan salah satu provinsi yang memiliki letak strategis pada pengembangan pariwisata nasional. Hal ini ini dipertegas dengan PP Nomor 5 tahun 2011 tentang RIPPARNAS Jawa Tengah berada pada 4 destinasi pariwisata nasional dengan turunan Peraturan Daerah Jateng Nomor 10 Tahun 2012 tentang 6 (enam) Perwilayahan pariwisata regional Jawa Tengah. Destinasi pariwisata provinsi wilayah Rembang dan Blora merupakan salah satu dari enam destinasi wisata tersebut. Kabupaten Rembang memiliki potensi wisata yang cukup potensial, baik dari segi wisata budaya, alam, maupun buatan. Berbagai macam atraksi daya Tarik menjadi salah satu tujuan utama mengapa Pemerintah sangat serius untuk mencoba menggugah berbagai macam potensi wisata yang ada.

Tabel 1. 3

Jumlah Daya Tarik Wisata,. Tenaga Kerja,. Desa Wisata, .Wisatawan dan Pendapatan . Menurut Kabupaten/Kota .di Jawa Tengah Tahun 2016-2021

NO	KAB/KOTA	DAYA TARIK WISATA					JUMLA HDTW	TENAGA		JUMLAH WISATAWAN				PENDAPATAN (Rp)	#
		Alam	Budaya	Buatan	Minat Khusus	Lain - Lain		L	P	Nusantara	#	Manca negara	#		
1	Banjarnegara	6	2	7	3	2	20	352	119	254.027	13	836	6	4.007.653.250	3
2	Banyumas	45	3	21	6	20	95	762	398	442.364	4	79	13	3.579.658.262	4
3	Batang	15	6	19	-	-	40	232	49	201.810	18	-		194.145	26
4	Blora	4	5	12	-	2	23	153	100	58.089	31	-		-	
5	Boyolali	18	11	24	-	-	53	20	14	65.665	29	-		-	
6	Brebes	10	-	5	1	-	16	198	46	108.736	26	-		233.658.200	22
7	Cilacap	17	4	4	-	-	25	57	9	67.364	28	-		96.595.643	24
8	Demak	3	2	1	-	-	6	154	17	381.774	6	42	16	726.489.000	17
9	Grobogan	9	5	6	-	2	22	104	48	89.390	27	-		-	
10	Jepara	20	11	4	1	1	37	192	104	297.646	10	3.004	3	-	
11	Karanganyar	11	4	8	-	-	23	183	76	334.276	8	698	8	324.184.500	21
12	Kebumen	16	-	5	1	-	22	88	5	148.599	22	-		1.306.167.130	8
13	Kendal	8	6	13	1	12	40	244	142	178.033	19	59	15	-	
14	Klaten	14	6	10	-	4	34	1.791	1.6 17	818.756	1	22.024	2	4.336.741.000	2
15	Kudus	5	18	6	-	-	29	225	82	426.261	5	-		-	
16	Magelang Kab.	24	16	15	8	4	67	1.320	319	696.193	3	22.227	1	802.644.903	13
17	Magelang Kota	1	7	2	1	1	12	108	34	240.893	15	1.361	4	-	
18	Pati	10	4	2	-	9	25	40	12	252.292	14	-		372.234.500	20
19	Pekalongan Kab.	13	-	5	9	4	31	489	122	154.937	21	-		779.109.500	15
20	Pekalongan Kota	3	-	3	-	1	7	81	20	24.934	33	79	13	115.139.000	23
21	Pemalang	17	1	6	1	-	25	426	134	128.448	23	-		547.981.500	19
22	Purworejo	17	2	9	4	14	46	705	105	255.349	11	36	18	-	

NO	KAB/KOTA	DAYA TARIK WISATA					JUMLA HDTW	TENAGA		JUMLAH WISATAWAN				PENDAPATAN (Rp)	#
		Alam	Budaya	Buatan	Minat Khusus	Lain - Lain		L	P	Nusantara	#	Manca negara	#		
23	Rembang	14	7	8	-	1	30	308	127	351.731	7	11	19	757.752.500	16
24	Salatiga	1	1	3	-	-	5	115	32	19.504	43	-		30.008.000	25
25	Semarang Kab.	5	5	33	7	-	50	3.294	3.040	755.616	2	699	7	14.792.711.348	1
26	Semarang Kota	5	11	8	1	11	36	499	186	252.839	14	388	9	2.817.333.700	5
27	Sragen	3	7	10	21	2	43	446	201	119.838	24	236	10	965.493.000	10
28	Sukoharjo	1	1	3	-	-	5	23	16	46.466	32	-		1.250.555.000	9
29	Surakarta	1	9	13	1	-	24	231	93	317.096	9	1.284	5	2.037.393.000	6
30	Tegal Kab.	2	-	1	-	-	3	98	23	162.823	20	137	11	925.225.400	11
31	Tegal Kota	4	-	1	-	2	7	204	634	227.920	16	-		665.651.500	18
32	Temanggung	5	2	7	-	4	18	233	370	111.949	25	40	17	1.637.487.050	7
33	Wonogiri	6	-	3	-	-	9	92	5	64.702	30	-		892.467.000	12
34	Wonosobo	4	-	4	-	-	8	42	6	223.005	17	120	12	790.094.100	14
TAHUN 2021		341	158	295	66	96	956	14.293	8.767	8.776.257		53.399		52.518.077.330	
Tahun 2020		284	153	249	59	89	834	12.912	7.931	57.900.863		691.699		314.725.465.729	
Tahun 2019		240	132	199	43	78	692	10.718	7.100	48.943.607		677.168		301.622.707.421	
Tahun 2018		209	127	173	32	74	615	10.017	6.676	40.118.470		781.107		212.570.844.806	
Tahun 2017		182	110	146	31	82	551	7.108	3.815	36.899.775		578.924		262.984.817.326	
Tahun 2016		160	82	131	27	77	477	5.118	2.228	33.030.843		421.191		238.373.330.846	

Keterangan : (#) adalah peringkat nilai tertinggi hingga terendah kab/kota Jawa Tengah
Sumber: sisdaporapar.jatengprov.go.id (diolah), 2022

Dilihat dari tabel 1.3 pada sisi produk wisata di Kabupaten Rembang pada tahun 2020 mempunyai potensi yang baik diantaranya terdiri dari potensi alam 14 tempat, budaya 7 tempat dan buatan 8 tempat, selain daya tarik alam, budaya dan buatan diatas juga terdapat potensi atraksi budaya masyarakat yang berupa kesenian-kesenian rakyat, religi, permainan rakyat, yang dapat ditampilkan untuk memperkaya pengalaman wisatawan yang datang ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Rembang. Dimana di sektor wisata Kabupaten Rembang tahun 2020 dapat menampung tenaga kerja kurang lebih 435 orang, dengan mendatangkan wisatawan kurang lebih wisatawan nusantara 252.839 orang dan wisatawan manca negara 388 wisatawan. Adapun sumbangan pendapatan daerah di sektor pariwisata sebesar Rp. 757.752.500 atau 1,44% dari pendapatan pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar Rp. 52.518.077.330.

Tabel 1.3 juga menjelaskan tentang daftar kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dari berbagai daerah, serta juga pendapatan dari sektor pariwisata. Kabupaten Rembang dalam kunjungan wisatawan nusantara menduduki posisi ke 7 terbanyak dari 34 Kabupaten kota di Jawa Tengah, kemudian dalam kunjungan wisatawan mancanegara menduduki posisi ke 19 terbanyak dari 34 Kabupaten kota di Jawa Tengah, dari sisi pendapatan menduduki posisi ke 16 dengan pendapatan Rp. 757.752.500,00 hal ini menjadi hal yang penting untuk diteliti karena apabila dibandingkan dengan Kabupaten yang menduduki peringkat tinggi seperti Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang dan Banjarnegara, Kabupaten Rembang sangat tertinggal jauh dari segi minat wisatawan dan pendapatan sektor pariwisata.

Dilihat dari wisatawan yang berkunjung di obyek wisata favorit di Kabupaten Rembang dapat Dilihat pada Gambar sebagai berikut :

Gambar 1. 2

Grafik Pertumbuhan Wisatawan yang berkunjung di Obyek Wisata



Sumber : Dinbudpar Kabupaten Rembang (diolah), 2022

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Rembang dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Hasil pra survey diskusi awal dengan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Rembang berpendapat bahwa penurunan angka wisatawan beberapa tahun terakhir dikarenakan faktor utama adalah dampak dari Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi arah kebijakan Pemerintah seperti pergeseran anggaran, kebijakan pembatasan masyarakat dan faktor-faktor lainnya. Penulis akan berfokus untuk melihat dan menganalisis arah kebijakan pengembangan wisata di Kabupaten Rembang. Fenomena ini dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Rembang beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi yang rata-rata mengalami penurunan.

Kabupaten Rembang menjadi salah satu tempat favorit untuk dijadikan destinasi wisata di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah, beberapa media mencantumkan

Kabupaten Rembang sebagai destinasi wisata favorit, obyek wisata favorit di Kabupaten Rembang yang menjadi destinasi wisata adalah :

Tabel 1. 4

Wisata Favorit di Kabupaten Rembang yang menjadi Destinasi Wisata

No.	Obyek wisata
1	De Kampoeng Rembang
2	Lasem Kota Tua/ Pecinan
3	Makam RA Kartini
4	Museum RA Kartini
5	Pantai Balongan
6	Pantai Caruban
7	Pantai Dasun
8	Pantai Karang Jahe
9	Pantai Nyamplung Indah
10	Pantai Pasir Putih Tasikharjo
11	Pasujudan/ Makam Sunan Bonang
12	Taman Rekreasi Pantai Kartini
13	Wana Wisata Kartini Mantingan
14	Wisata Alam Kajar View
15	Wisata Alam Watu Congol
16	Wisata Mangrove
17	Wisata Panohan
18	Sumber Semen Sale
19	Situs Perahu Kuno Punjulharjo
20	Pasar Mbrumbung
21	Taman Alas Pandansili
22	Trio G
23	Bukit Cendana
24	Pagar Pelangi RN Asa
25	Pantai Jatisari
26	Watu Layar
27	Sendang Kaputren
28	Taman Lengkowo
29	Taman Bubut Akar Kartini
30	Rest Area Binangun

Sumber: Sumber: sisdaporapar.jatengprov.go.id (diolah), 2022

Berdasarkan tabel 1.4 di atas terlihat bahwa obyek wisata favorit di Kabupaten Rembang yang menjadi destinasi wisata sebanyak 30 obyek wisata. 30 obyek wisata tersebut tentu dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah. Namun

demikian, saat ini tidak semua tempat wisata dimanfaatkan oleh Pemerintah. Destinasi wisata sebagian besar dikelola oleh BUMDesa ataupun kelompok masyarakat. Dari sekitar 30 destinasi wisata di Kabupaten Rembang hanya 2 obyek destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, sehingga hal ini berdampak kepada pendapatan Pemerintah dalam sektor pariwisata. Berikut pendapatan obyek wisata di Kabupaten Rembang 3 tahun terakhir:

Tabel 1. 5
Pendapatan Obyek. Wisata Kabupaten Rembang Tahun, 2019-2021

NO	NAMA_WISATA	2019	2020	2021
		PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENDAPATAN
1	De Kampoeng Rembang	Rp 227,800,000	Rp 36,450,000	Rp 89,600,000
2	Lasem Kota Tua/ Pecinan	Rp -	Rp 893,575,000	Rp 265,000,000
3	Makam RA Kartini	Rp -	Rp 10,000,000	Rp 6,000,000
4	Museum RA Kartini	Rp 22,332,000	Rp -	Rp 1,668,000
5	Pantai Balongan	Rp 65,769,000	Rp 131,700,000	Rp 109,938,000
6	Pantai Caruban	Rp 119,000,000	Rp 50,000,000	Rp 38,515,000
7	Pantai Dasun	Rp -	Rp 51,330,000	Rp 91,560,500
8	Pantai Karang Jahe	Rp 1,199,495,000	Rp 1,102,776,000	Rp 347,670,000
9	Pantai Nyamplung Indah	Rp -	Rp -	Rp -
10	Pantai Pasir Putih Tasikharjo	Rp 1,057,741,000	Rp 357,255,000	Rp 1,009,046,000
11	Pasujudan/ Makam Sunan Bonang	Rp 13,500,000	Rp 12,600,000	Rp 17,307,000
12	Taman Rekreasi Pantai Kartini	Rp 228,862,500	Rp 170,000,000	Rp 21,869,500
13	Wana Wisata Kartini Mantingan	Rp 503,245,000	Rp -	Rp 73,175,000
14	Wisata Alam Kajar View	Rp -	Rp -	Rp -
15	Wisata Alam Watu Congol	Rp -	Rp -	Rp -
16	Wisata Mangrove	Rp 17,843,000	Rp 12,300,000	Rp 94,921,000
17	Wisata Panohan	Rp -	Rp -	Rp -
18	Sumber Semen Sale	Rp -	Rp 23,790,000	Rp 27,418,000
19	Situs Perahu Kuno Punjulharjo	Rp -	Rp -	Rp -
20	Pasar Mbrumbung	Rp 250,000,000	Rp 126,000,000	Rp 641,026,000
21	Taman Alas Pandansili	Rp -	Rp -	Rp -
22	Trio G	Rp 11,000,000	Rp 100,000,000	Rp 38,666,500
23	Bukit Cendana	Rp -	Rp -	Rp -

NO	NAMA_WISATA	2019	2020	2021
		PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENDAPATAN
24	Pagar Pelangi RN Asa	Rp -	Rp -	Rp 319,562,500
25	Pantai Jatisari	Rp -	Rp -	Rp -
26	Watu Layar	Rp -	Rp -	Rp -
27	Sendang Kaputren	Rp -	Rp -	Rp 700,000
28	Taman Lengkowo	Rp -	Rp 100,000,000	Rp 1,956,000
29	Taman Bubut Akar Kartini	Rp -	Rp -	Rp 51,538,000
30	Rest Area Binangun	Rp -	Rp 50,000,000	Rp 50,385,000
	Jumlah	Rp 3,716,587,500	Rp 3,227,776,000	Rp 3,297,522,000

Sumber : Dinbudpar Pemkab Rembang (diolah), 2022

Hasil Pra Survey dengan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa apabila dilihat daftar pendapatan obyek wisata di Kabupaten Rembang maka sebenarnya masih dapat di otimalkan untuk masuk ke Penghasilan Asli Daerah. Hal ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh beberapa Kabupaten kota di Jawa Tengah maupun di DIY. Tingginya pendapatan di beberapa tempat wisata dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan pemerataan pada sektor pariwisata yang lain. Apabila kita fokus kepada hasil retribusi, maka sebenarnya hanya 2 obyek destinasi wisata yang masuk ke dalam retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu Taman Pantai Kartini dan Museum Kartini, tarif retribusi untuk kedua obyek wisata tersebut masuk kedalam Perda No. 1/2020. – Perubahan Kedua atas Perda No. 12 Th. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya juga mengatur tentang retribusi pariwisata Kabupaten Rembang, bahwa dijelaskan pada perda tersebut pada pasal 30 perihal tarif tempat rekreasi Pantai Kartini dan Musium Kartini hanya dikenakan tarif Rp.3000,00 dan Rp.2500,00. Hasil Pra Survey dengan Kabid Pemasaran Pariwisata Dinbudpar Kabupaten Rembang berpendapat bahwa retribusi tempat wisata di obyek wisata yang di kelola oleh Pemerintah daerah terlalu rendah apabila dibandingkan dengan obyek wisata yang dikelola oleh BUMDesa maupun Swasta dan tidak relevan dengan

keadaan saat ini, sehingga hal ini akan mempengaruhi pendapatan daerah dari sisi pariwisata.

Berikut daftar pendapatan daerah di tahun 2022 :

Tabel 1. 6
Retribusi Pendapatan Pariwisata Tahun 2022

BULAN	TEMPAT WISATA					
	PANTAI KARTINI			MUSEUM KARTINI		
	JUMLAH KARCIS	BESARAN	TOTAL	JUMALAH KARCIS	BESARAN	TOTAL
Januari	5572	3,000.00	18,656,500.00	172	2,000.00	344,000.00
Febreuari	2429	3,000.00	7,940,000.00	349	2,000.00	698,000.00
Maret	2965	3,000.00	9,598,500.00	759	2,000.00	1,518,000.00
April	1567	3,000.00	4,900,000.00	292	2,000.00	584,000.00
Mei	30831	3,000.00	119,845,000.00	813	2,000.00	1,626,000.00
Juni	1297	3,000.00	2,594,000.00	1297	2,000.00	2,594,000.00
Juli	3294	3,000.00	10,535,000.00	402	2,000.00	782,000.00
Agustus	2326	3,000.00	7,456,500.00	311	2,000.00	622,000.00
September	1884	3,000.00	6,076,500.00	1884	2,000.00	6,076,600.00
TOTAL			187,602,000.00			14,844,600.00

Sumber : Dinbudpar Kabupaten Rembang tahun 2022

Pendapatan dari sektor pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah daerah pada tahun 2022 berjalan mengalami naik turun di setiap bulan, penulis tidak dapat memberikan data awal tahun 2019 sampai tahun 2021 dikarenakan ada indikasi terdapat deviasi dalam pengelolaan pendapatannya. Besaran tarif masuk tempat wisata disini menjadi pembahasan yang penting karena sudah selayaknya ada kenaikan apabila dibandingkan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Hasil Pra Survey dan diskusi awal dengan Kepala Dinas Priwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Rembang pada tanngal 02 juli 2022, bahwa masalah serius lainnya dalah belum maksimalnya digital marketing pariwisata di Kabupaten Rembang, yang dimana saat ini harusnya menjadi salah satu poin yang sangat penting untuk dapat menciptakan ekosistem wisata yang berkelanjutan. Kelemahan itu mengakibatkan

Kabupaten Rembang sulit untuk berkembang atau dapat dikatakan jalan ditempat. Kurangnya *city branding* mengakibatkan sulitnya perkembangan pariwisata di Kabupaten Rembang, sampai saat ini Kabupaten Rembang bukan merupakan tujuan utama orang untuk berwisata, sehingga perlu adanya suatu langkah yang tepat untuk membuat suatu *Master of Point Interest* yang membuat masyarakat luas menjadikan Kabupaten Rembang menjadi daerah tujuan wisata inti. Secara holistik hal ini memiliki banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Proses kebijakan, kultur budaya Kabupaten Rembang yang agamis dan religious juga menjadi hal yang dapat dikatakan tantangan tersendiri untuk menciptakan embrio pariwisata di Kawasan masyarakat yang memiliki kultur agama yang kuat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Rembang belum maksimal, untuk mengatasi masalah tersebut maka penelitian ini penting untuk dilakukan dengan cara mengangkat sebuah Teori dari Pengembangan Pariwisata yang telah dinilai mampu mengatasi permasalahan yang ada dengan diiringi dengan Teori Analisis Kebijakan publik, sehingga pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah mengapa kebijakan pengembangan Pariwisata di Kabupaten Rembang belum maksimal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Terjadi penurunan pertumbuhan kunjungan wisatawan dan pendapatan pariwisata di Kabupaten Rembang
- 2) Belum optimalnya kebijakan retribusi sektor pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Rembang

- 3) Belum terpadunya strategi pemasaran pariwisata dalam membuat *city branding master of point interest* pariwisata di Kabupaten Rembang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kesesuaian Lima Komponen pengembangan pariwisata dengan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang ?
2. Merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan yang tepat untuk kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis lima komponen pengembangan pariwisata dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang
2. Merumuskan rekomendasi alternatif yang tepat untuk menyempurnakan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang

1.5. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

I.5.1 Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kebijakan pengembangan pariwisata.

I.5.2 Secara praktis

- a. Bagi Pemerintah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang.
- b. Bagi Masyarakat umum : Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas tema serupa.

1.6 Penelitian Terdahulu

Riska Destiana, Kismartini, Tri Yuningsih (2020) Pengembangan pariwisata halal di Pulau Penyengat membutuhkan kerjasama dan dukungan dari banyak pihak. Kurang optimalnya peran *stakeholders* dalam kerjasama pengembangan pariwisata menjadikan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat, menganalisis peran *stakeholders*, menganalisis hubungan antar *stakeholders*, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Metode menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggabungkan wawancara secara daring, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi pariwisata halal Pulau Penyengat melibatkan *stakeholders* dengan konsep pentahelix, terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, Pemerintah dan media massa. Terdapat 38 *stakeholders* yang terlibat dan diklasifikasikan ke dalam *stakeholders* primer, kunci dan sekunder. Peran *stakeholders* tercermin dalam peran *Policy Creator*, koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator. Hubungan antar *stakeholders* dilihat dari bentuk dan aktivitasnya. Nilai dan komunikasi menjadi faktor pendukung dalam pengembangan destinasi pariwisata halal, serta kepercayaan dan kebijakan menjadi faktor penghambatnya. Saran yang disampaikan adalah penerbitan regulasi pariwisata halal, pembentukan badan khusus wisata Pulau Penyengat, peningkatan koordinasi antar *stakeholders*, peningkatan peran

stakeholders akademisi dan komunitas, perbaikan fasilitas pendukung pariwisata halal, dan promosi pariwisata halal melalui saluran digital.

Dalam penelitian ini, pengembangan pariwisata dilihat dari perbedaan teori yaitu menggunakan teori Peran stakeholder dengan cara pentahelix sedangkan penelitian penulis menggunakan teori pengembangan pariwisata dengan analisis dari Bardach.

Dewi Kusuma Sari (2011) Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang. Dengan *travel cost method* menunjukkan bahwa dari enam variabel dalam penelitian yaitu biaya perjalanan Pantai Sigandu, biaya perjalanan obyek wisata lain (Pantai Widuri), penghasilan, pendidikan, umur, dan jarak, yang berpengaruh secara signifikan pada frekuensi kunjungan ke Pantai Sigandu ialah variabel biaya perjalanan Pantai Sigandu, biaya perjalanan obyek wisata lain (Pantai Widuri), penghasilan, dan jarak pada tingkat signifikansi 5%. Valuasi ekonomi untuk Pantai Sigandu ialah Rp 26.739.188.00 dengan nilai surplus konsumennya per tahun ialah Rp. 353.838,07 Sedangkan pada pendekatan AHP, menunjukkan bahwa alternatif yang diambil dalam Pengembangan Pantai Sigandu secara overall adalah pengembangan Pantai Sigandu sebagai obyek wisata primadona Kabupaten Batang dengan nilai bobot 0,128 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan nilai bobot 1,108, dan memberikan sarana dan fasilitas pada investor dengan nilai bobot 0,103.

Dalam penelitian ini, keberhasilan pengembangan pariwisata dapat dilihat dari enam variabel Cost Method sehingga dapat mempengaruhi dari jumlah kunjungan wisata, sedangkan penelitian penulis akan dilihat dari teori pengembangan pariwisata 5A.

Sefira Ryalita Primadany, dkk (2013) Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah. Di sinilah pentingnya peraturan dan kesadaran dari Pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata. Sektor pariwisata memerlukan

suatu strategi dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang di miliki bisa di kembangkan secara optimal. Didalam memajukan sektor pariwisata ditingkat daerah peran Pemerintah daerah adalah sebagai motor penggerak yang selanjutnya memberikan kewenangan penuh kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menentukan strategi-strategi pembangunan kepariwisataan.

Dari penelitian ini, hampir memiliki kesamaan dengan rancangan dan gambaran peneliti namun, yang dillihat dalam pengembangan pariwisata hanya hal-hal yang dilakukan pemerintah sehingga inovasi yang dihasilkan kadangkala tidak maksimal dan tidak sesuai dengan kajian teori akademisi, sehingga penulis akan lebih mengoptimalkan teori akademisi untuk penentuan arah kebijakan pengembangan pariwisata yang sesuai.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Gita Ratri Prafitri dan Maya Damayanti (2016)** dengan judul “Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas)”. Hasil penelitian antara lain : Pada tingkat organisasi, organisasi telah menunjukkan kapasitas yang baik dalam aspek kemitraan eksternal, aspek pengembangan potensi wisata, serta aspek promosi desa wisata. Sedangkan pada aspek kepemimpinan dan koordinasi, POKDARWIS “Ketenger Adventure” menunjukkan kapasitas yang kurang baik. individu, individu memiliki kapasitas yang baik dalam merintis pengembangan potensi wisata. Individu memiliki kapasitas yang cukup baik dalam pengelolaan atraksi wisata, pengelolaan cinderamata, serta pelayanan terhadap wisatawan. Namun individu memiliki kapasitas yang kurang baik dalam pemahaman dan pengaplikasian konsep desa wisata. Masyarakat Desa Ketenger telah mendapatkan programprogram peningkatan kapasitas yang didakan baik dari Dinas Pariwisata maupun organisasi lainnya.

Penelitian diatas sama-sama membahas tentang sebuah pengembangan pariwisata, namun hanya pada aspek kelembagaan. Cakupan kecil tersebut kurang efisiensi apabila diterapkan pada sebuah pengembangan wisata di suatu Daerah, maka peneliti mencoba untuk berfikir kritis bagaimana dapat memecahkan masalah dengan sebuah teori yang tentu disandingkan dengan keadaan yang ada di Kabupaten Rembang.

Penelitian selanjutnya oleh **Ida Hayu Dwimawanti, Alif Fajar Sidiq (2018)** dengan judul “Manajemen Pariwisata Oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan (Studi Pada Objek Wisata Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan)”. Hasil Penelitian sebagai berikut : Manajemen pariwisata di Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) masih belum optimal, masih ditemukan kendala maupun permasalahan pada setiap tahapannya. Permasalahan pada tahap perencanaan yaitu pegawai tidak memahami visi, pendataan usaha pariwisata minim, anggaran terbatas, dan belum ada mekanisme pengendalian (monitoring) kegiatan yang jelas. Pada tahapan pengorganisasian terdapat beberapa permasalahan antara lain mekanisme perekrutan pegawai outsourcing yang tidak jelas dan asal-asalan, tidak ada spesialisasi kerja, serta alur koordinasi berjenjang membuat proses koordinasi kurang efektif. Permasalahan dalam tahapan implementasi program antara lain, daya tarik destinasi wisata belum menarik kunjungan wisatawan, jumlah dan kondisi fasilitas wisata kurang memadai, TIC kurang efektif, jumlah dan kualitas akomodasi kurang memadai, angkutan umum belum memiliki jadwal keberangkatan yang pasti, kompetensi pegawai minim, penyelenggaraan Diklat, sertifikasi dan pendidikan sadar wisata minim, belum ada kerjasama dengan pihak swasta dan promosi wisata belum maksimal. Pada tahapan pengawasan, beberapa permasalahan pada tahapan pengawasan antara lain, pengawasan yang dilakukan hanya sebatas kontrol

terhadap pendapatan, kemudian pengawasan terkendala jumlah pegawai yang terbatas, serta belum ada pencapaian/prestasi sektor pariwisata yang membanggakan.

Pada penelitian diatas, memiliki kesamaan pada belum terciptanya *point of master interest*, sehingga masih banyak kendala-kendala yang terjadi seperti yang ada di Kabupaten Rembang, yang sebenarnya menginginkan tujuan yang sama namun menggunakan teori manajemen sedangkan penulis menggunakan teori analisis kebijakan dengan dikombinasikan dengan teori pengembangan pariwisata 5A.

Penelitian berikutnya oleh **Kodrat Alam (2015)** dengan judul “Analisis Potensi Pariwisata Alam Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2015”. Hasil penelitian sebagai berikut Kabupaten Pekalongan memiliki banyak potensi pariwisata alam yang ada di Kabupaten Pekalongan. Hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan pariwisata meliputi terbatasnya sarana dan prasarana penunjang serta kurangnya kerjasama yang melibatkan sektor swasta maupun masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata alam di Kabupaten Pekalongan.

Analisis ini memiliki tujuan yang sama yaitu menemukan sebuah hal yang baik untuk dikembangkan pada sektor pariwisata, namun perbedaan teori yang mendasar yaitu tentang teori analisis kebijakan dan teori pengembangan pariwisata 5A.

Penelitian oleh **I Wayan Suardana (2016)** dengan judul “ Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali)”. Hasil penelitian bahwa Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Bali merupakan kebijakan dalam pembangunan yang berdimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup dengan landasan keadilan tidak hanya untuk generasi saat ini tetapi juga generasi masa yang akan datang. Konsep ini muncul akibat dari perkembangan ekonomi dan

dampaknya pada Bali. Untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan umumnya mewakili pemikiran: (1) kepedulian pembangunan berkelanjutan, dengan berbagai tantangannya, (2) perhatian dengan dampak industri pariwisata. Untuk itu pariwisata dipandang sebagai suatu sistem yang saling terkait dan saling berinteraksi. Dibutuhkan sinergi kebijakan dengan pendekatan multisektor dan multidisiplin. Oleh karena itu, perlu ada beberapa strategi untuk mengembangkan pariwisata yang berbarengan dengan usaha konservasi budaya dan alam. Strategi ini disesuaikan dengan wilayah dan kondisi demografis wilayah Bali.

Penelitian analisis kebijakan diatas memang memiliki maksud yang sama namun dalam hal ini peneliti memiliki catatan khusus yaitu pada lokus penelitian, dimana Kabupaten Rembang dengan Daerah yang ada di Pulau Bali memang lah berbeda, mereka telah menemukan inti wisata yang mereka inginkan sehingga peneliti perlu untuk mengadopsi penelitian ini agar di Kabupaten Rembang kedepan juga memiliki tujuan yang sama.

Penelitian oleh **Violetta Simatupang & Sukmadi (2021)** dengan judul “Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Kota Bandung Selama Pandemi Covid 19”. Hasil penelitian sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 tengah memasuki era normal baru. Pariwisata berkelanjutan akan menjadi sebuah konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata, setelah pandemi Covid-19 selesai. Kerja pariwisata berkelanjutan bukan hanya kerja sektoral, tapi harus menyeluruh baik masyarakat, Pemerintah, akademisi dan lainnya, atau yang biasa disebut pentahelix. Pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian dunia, memiliki peran positif dan negatif bagi keberlangsungan hidup alam. Penyebaran COVID-19 yang cepat mendorong Pemerintah

melakukan berbagai upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Implikasi dari kondisi tersebut berdampak langsung kepada industri pariwisata yang ada di Kota Bandung.

Penelitian diatas menganalisis pengembangan pariwisata dengan teori pentahelix, pada tahap ini lokus memiliki perbedaan yang mendasar dengan lokus peneliti, dan teori yang suguhkan juga berbeda, namun pada analisis ini sama-sama memiliki tujuan meningkatkan daya Tarik wisata, sehingga peneliti perlu untuk melihat dari sisi daya Tarik wisatan pada analisis ini.

Penelitian oleh **Agung Saputra dan Khaidir Ali (2020)** dengan judul “Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir”. Hasil penelitian Salah satu sektor unggulan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sektor pariwisata. Sektor ini diharapkan dapat menimalisirkan tingkat kemiskinan dan pengangguran khususnya di daerah. Salah satu daerah yang saat ini sedang di program untuk percepatan pembangunan pariwisata adalah kawasan Danau Toba yang dikelilingi oleh 8 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Samosir merupakan

salah satu daerah yang ada di kawasan Danau Toba yang hampir 85% hasil pendapatan asli daerahnya adalah di sektor pariwisata. Maka, diperlukannya program pengembangan pariwisata di kabupaten Samosir dengan berbagai tindakan , dan salah satu upaya yang dilakukan adalah pengelolaan objek wisata baik yang dikelola langsung oleh Pemerintah maupun masyarakat. Untuk mendukung upaya tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Samosir telah merumuskan kebijakan pariwisata yang menentukan kriteria dan pengelompokan objek wisata di daerahnya sehingga diharapkan dapat memudahkan pengelolaan

objek wisata secara maksimal. Kebijakan pariwisata ini juga bertujuan untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba melalui peningkatan kemampuan dan kreativitas sumber daya manusianya melalui pengelolaan objek wisata yang benar dan efektif. Dalam mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang berkaitan pengelolaan objek wisata adalah Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir, bahwa dengan kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan objek wisata dengan baik. Namun, kenyataannya banyak unsur yang harus dapat mendukung implementasi kebijakan ini yaitu kemampuan sumber daya baik dari Pemerintah maupun masyarakat di objek wisata. Tidak hanya itu dalam pengelolaan objek wisata juga terkendala oleh fasilitas yang memadai termasuk kenyamanan wisatawan dalam mendapatkan informasi tentang wisata yang dikunjunginya.

Penelitian dengan lokus yang sangat diunggulkan yang menjadi 10 destinasi prioritas nasional menjadikan analisis ini perlu untuk dilihat dalam sektor pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu walaupun ada perbedaan teori namun perlu dikembangkan kelemahan pada analisis ini untuk dikaji lebih lanjut pada analisis kebijakan public di Kabupaten Rembang.

Penelitian oleh **Achmad Sjafii (2017)** dengan judul “Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan pada era otonomi daerah untuk mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan di daerah diperlukan suatu strategi melalui kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara terus menerus. Kebijakan ini ditetapkan sebagai suatu pedoman dalam penyelenggaraan kepariwisataan baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah memiliki tiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial budaya,

dan lingkungan hidup. Ketiga dimensi tersebut didasarkan pada prinsip keadilan yang tidak hanya memberikan keuntungan generasi kekinian, tetapi juga generasi mendatang. Selain itu, faktor penting dalam pengembangan pariwisata adalah pengawasan standar dan kualitas jasa wisata.

Dalam penelitian diatas menegaskan tiga dimensi penting dalam pengembangan pariwisata, yang tentu memiliki perbedaan dengan pengembangan pariwisata 5A, sehingga nanti hasil penelitian ini diharapkan akan lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh **Anak Agung Adi Lestari dan Ni Putu Noni Suharyanti (2015)** dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata”. Hasil penelitian menunjukkan pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi diberbagai Negara termasuk salah satunya Negara Indonesia. Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dalam memperoleh devisa. Upaya pengelolaan obyek-obyek tempat pariwisata di beberapa daerah di Indonesia saat ini cukup meningkat hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai tempat pariwisata di Indonesia. Karena peningkatan itulah Pemerintah perlu membentuk suatu kebijakan yaitu kebijakan pariwisata untuk mengatur agar perkembangan pariwisata tetap memperhatikan aturan-aturan hukum yang ada serta norma-norma yang ada dimasyarakat sekitar daerah pariwisata agar tercipta ketertiban umum dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Komitmen Pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pencapaian dibidang pariwisata. Kuatnya komitmen Pemerintah dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin cepat dan optimal. Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor pariwisata salah satunya dapat dilihat dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang

dibentuk untuk mengatur ketertiban dalam kegiatan bisnis di sektor pariwisata salah satunya yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan terfokus kepada analisis kebijakan pengembangan pariwisata yang mana akan menggunakan dua teori utama yaitu teori Analisis kebijakan dari *Bardach* dan menggunakan teori pengembangan pariwisata yang memperhatikan 5 komponen utama kepariwisataan dari *Edward inskeep (1991:27)*. Dari proses melihat pengembangan wisata menggunakan skema 5 unsur komponen dalam pariwisata yaitu *Attraction* (daya Tarik), *Accessibility* (aksesibilitas/prasarana wisata), *Acommodation* (akomodasi/sarana), *Amenities* (amenitas/infrastruktur), dan *Ancillary Service* (pelayanan tambahan dari masyarakat, lingkungan dan budaya), maka alasan utama menggunakan teori tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana berjalannya proses pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang.

Setelah mengimplementasikan teori 5 komponen utama kepariwisataan tersebut kemudian dilanjutkan mengimplementasikan teori Analisis Kebijakan dari *Bardach* yaitu merumuskan masalah kebijakan, menentukan tujuan dan sasaran kebijakan, mengidentifikasi parameter kebijakan, mencari alternatif-alternatif serta memutuskan alternatif kebijakan yang mungkin sebaiknya dilakukan

1.7 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah menyelidiki, memperhatikan, memecah dan mengenali informasi (Arikunto, 2010:58). Pemeriksaan ini melibatkan sumber dan catatan yang

berbeda seperti buku dan referensi yang berbeda sebagai alasan hipotetis untuk penyelidikan yang mencerahkan.

1.7.1 Administrasi Publik

Administrasi publik diartikan sebagai sebuah bidang pengetahuan bagaimana untuk mengatur, pembiayaan, memobilisasi serta mengorganisasi sebuah organisasi Pemerintah agar tercapai keinginan negara yang ingin dikehendaki. Administrasi publik akan menginterpretasikan, mengevaluasi serta meningkatkan kinerja atau profesionalitas pelaksana. Hal ini sejalan dengan teori menurut (Atmosudirjo, 1980 :272) yang menjelaskan bahwa administrasi publik adalah administrasi dari organisasi negara dan administrasi yang mengejar realisasi dari tujuan sebuah negara. Administrasi Publik adalah bagaimana mengatur, menyediakan dana, memobilisasi dan memimpin berbagai organisasi Pemerintah Litchfield, E. H. dalam (Greenfield, T., & Ribbins, 2005). (Marini, 2000) menjelaskan bahwa administrasi publik mengarah dua aktivitas yang berbeda tetapi berkaitan, aktivitas tersebut adalah: (1) Profesionalitas dan (2) bidang akademik yang berusaha menginterpretasikan, mengelaborasi, mengevaluasi, dan meningkatkan pelaksanaan profesional juga melatih pelaksana tersebut. Menurut (Nigro, 1970) sebagai berikut :

- (1) *In a public setting, "public administration" refers to cooperative group effort. merupakan kerja sama kelompok dalam lingkungan Pemerintah).*
- (2) *(Public Administration) encompasses each of the three divisions: executive, legislative, and judicial, as well as their connections to one another. Administrasi publik mencakup tiga cabang: eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan antara ketiganya).*
- (3) *(Public Administration) is a part of the political process because it plays a significant role in the formulation of public policy. Mempunyai peranan*

penting dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan merupakan sebagian dari expositions politik).

(4) *(Public Administrastion) is cosely related with various confidential gathering and people in offering types of assistance to the local area. (Using Swasta and Perorangan for the purpose of providing education to the masses)*

(5) *(Public Organization) is different in huge ways from private adinistrastion.(Administrasi publik memiliki perbedaan tujuan yang signifikan dari administrai privat).*

Sebagaimana dikemukakan oleh Pfiffner dan Presthus yang dikutip Syafei (2003:

31), mereka memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan negara sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan perwakilan politik merupakan bagian dari penyelenggaraan negara.
- b) Proses pengkoordinasian usaha perorangan dan kolektif untuk melaksanakan kebijakan pemerintah disebut administrasi negara. Sebagian besar dari hal ini menyangkut operasi Pemerintah sehari-hari.
- c) Kesimpulannya, Administrasi Negara adalah suatu proses yang memusatkan perhatian pada kebijakan pemerintah, mengarahkan berbagai keterampilan dan metode, serta memberikan arahan dan tujuan kepada banyak orang.

Sedangkan laporan Chander dan Plano dalam Keban (2004: 3) menyebutkan bahwa:

“Administrasi Publik adalah proses pengorganisasian dan pengkoordinasian sumber daya dan personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan publik.”

Sementara itu Henry dalam Harbani Pasolong (2008: 8) yang menyatakan: “Administrasi Publik merupakan kombinasi kompleks antara teori dan praktik,” menurut definisinya, “dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diaturnya dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.” Administrasi publik bertujuan untuk melembagakan praktik manajemen sedemikian rupa sehingga berpegang pada nilai-nilai

efektivitas, efisiensi, dan lebih memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan Waldo dalam Pasolong 8 mencirikan implementasi kebijakan sebagai penyelenggaraan dan keterhubungan individu serta perangkat keras untuk mencapai tujuan pemerintah.

Tujuan akhir yang dapat diambil dari beberapa pengertian manajemen kebijakan adalah partisipasi yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau yayasan dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan berhasil dan efektif dalam mengatasi permasalahan publik.

1.7.2 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah sudut pandang mendasar yang didasarkan pada seperangkat nilai dan mencakup teori, konsep, asumsi, metodologi, atau pendekatan mendasar yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian permasalahan dunia nyata. Dalam konsepnya (Marliani, 2018:6), George Frederickson merumuskan enam model paradigma administrasi publik yang dijelaskan secara teoritis:

- (1) Paradigma 1 atau birokrasi klasik adalah struktur organisasi dan fungsi atau prinsip manajemen, dengan berbagai organisasi pemerintah dan dunia usaha sebagai lokusnya. Tujuan dari paradigma ini adalah rasionalitas, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
- (2) Birokrasi neoklasik sebagai paradigma kedua. Paradigma ini berfokus pada proses pengambilan keputusan birokrasi pemerintah, dengan memberikan perhatian khusus pada bagaimana pendanaan riset perilaku, manajemen, sistem, dan operasi digunakan dan di mana peran pendanaan tersebut dalam pengambilan keputusan.

- (3) Pandangan Dunia 3, Kelembagaan, pandangan dunia ini berpusat pada pemahaman cara berperilaku administratif yang juga dipandang sebagai sesuatu yang kompleks, dan lebih jauh lagi pada siklus dinamis yang stabil dan lambat.
- (4) Pandangan Dunia 4, Antara Hubungan Manusia, pandangan dunia ini berpusat pada komponen hubungan antar manusia dan sudut mental sosial dalam setiap jenis perkumpulan dan administrasi.
- (5) Paradigma 5, Pilihan Publik: Paradigma ini menegaskan bahwa administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari politik dan bahwa pilihan publik terhadap barang dan jasa yang ditawarkan oleh berbagai organisasi menjadi pusatnya.
- (6) Dalam Paradigma 6, Administrasi Publik Baru, Frederickson bertujuan untuk mengembangkan sistem desentralisasi, membentuk organisasi yang responsif dan partisipatif, dan menyediakan layanan yang diperlukan untuk mengatur, merancang, dan memungkinkan organisasi berjalan menuju realisasi nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa dalam arah administrasi publik saat ini, paradigma administrasi publik baru merupakan paradigma yang mendekati kondisi saat ini di masyarakat. Paradigma ini menegaskan tentang pengorganisasian terhadap masyarakat sehingga terbentuk kelompok-kelompok yang kemudian dapat diberdayakan.

1.7.3 Kebijakan publik

Menurut (Dwiyanto, 2009 :18-19) Kebijakan publik adalah segala bentuk kegiatan Pemerintahan untuk menyelesaikan masalah publik guna mewujudkan kepentingan urusan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan. Strategi publik harus diciptakan sebagai instrumen untuk mendorong perubahan kawasan publik, sehingga pembangunan

perubahan kawasan publik dapat berjalan lebih cepat dibandingkan dengan penataan publik yang telah diupayakan sebelumnya, dan pendekatan publik tidak boleh menggunakan pemikiran universal untuk mengatasi permasalahan publik yang semakin kompleks. (Dwiyanto, 2009 :55). Menurut B.W. Hogwood dan L.A. Gunn dalam (Parsons, 2006) kebijakan diartikan dalam beberapa pengertian, yaitu:

1. sebagai sebutan untuk suatu subbidang pekerjaan
2. sebagai ungkapan tujuan umum negara atau kegiatan yang diantisipasi
3. sebagai suatu usulan tertentu
4. sebagai keputusan pemerintah
5. sebagaimana izin resmi
6. Sebagai program Hasil
7. Sebagai hipotesis atau model dan
8. sebagai metode

Thomas Dye pada (Kusumanegara, 2010) secara khusus memberikan definisi kebijakan publik, menggambarkan ilmu kebijakan tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun dibiarkan. Dye juga hanya menunjukkan bahwa agen tunggal pengambil keputusan adalah Pemerintah, sedangkan keputusan yang dibuat oleh perusahaan swasta, kelompok kepentingan, individu atau kelompok sosial lainnya tidak dianggap sebagai kebijakan publik.

Kebijakan Publik diartikan tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemegang kebijakan sebagai bentuk pencarian solusi atas permasalahan-permasalahan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam program-program Pemerintah. Kebijakan publik penting untuk dikembangkan sebagai salah satu bentuk reformasi publik sehingga reformasi publik semakin maju ke depannya. Kebijakan publik juga mengandung arti sebagai keputusan Pemerintah yang dikeluarkan atas dasar tujuan yang telah ditentukan dan tertuang ke dalam beberapa kegiatan/aktivitas serta dilaksanakan bersama-sama, yang diharapkan dapat menghasilkan output yang berguna nantinya. Kebijakan publik terdiri

dari tiga komponen seperti dijelaskan menurut (Abdal, 2015:146) tiga komponen dalam kebijakan publik, yaitu: pertama adalah Tujuan yang akan dicapai, yang kedua adalah Sasaran yang detail, dan yang ketiga adalah Cara menggapai sasaran yang telah ditentukan.

Kebijakan Publik bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan campur tangan Pemerintah maupun pihak-pihak lainnya yang terlibat. Fungsi intervensi dari kebijakan publik terdapat dalam implementasi kebijakan itu sendiri, Pemerintah membuat kebijakan yang tertuang dalam program maupun kegiatan yang kemudian dilaksanakan dengan bekerja sama dengan para *stakeholders*. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Nugroho, 2003:161) bahwa pada prinsipnya tujuan dari kebijakan adalah intervensi, sehingga implementasi kebijakan sebenarnya merupakan fungsi dari intervensi itu sendiri.

Kebijakan Publik memiliki instrumen-instrumen yang kemudian dapat diklasifikasikan. Klasifikasi Instrumen-Instrumen Kebijakan menurut (Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, 2009), terdapat 3 instrumen dalam kebijakan, instrumen tersebut adalah:

- 1) Instrumen Kesengajaan, Sifat instrumen kesengajaan yang tidak menyertakan kontribusi Pemerintah dan tidak dipaksa untuk melakukan tugas Pemerintah.
- 2) Instrumen Wajib: Juga dikenal sebagai instrumen direktif, instrumen wajib yang memaksa atau mengarahkan tindakan individu atau bisnis sasaran, sehingga mereka hanya punya sedikit atau tidak ada pilihan dalam cara meresponsnya. Dalam menjalankan kekuasaan kedaulatannya, Badan Publik dapat mengatur penduduk setempatnya untuk menyelesaikan latihan atau secara langsung memberikannya.

- 3) Ansambel Instrumental: Instrumen campuran menggabungkan elemen instrumen yang disengaja dan diperlukan.

Kebijakan Publik sebagai suatu bentuk pencarian solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada memiliki berbagai proses di dalamnya. Menurut B.W. Hogwood dan L.A. Gunn dalam (Parsons, 2006 :81) proses kebijakan adalah sebagai berikut:

- 1) Proses pencarian isu serta penentuan agenda, proses ini dimaksudkan untuk mencari isu-isu yang tersebar.
- 2) Menyaring isu yang telah ditentukan, setelah mencari isu-isu diluar, permasalahan tersebut kemudian disaring, mana masalah yang termasuk dalam permasalahan publik.
- 3) Mendefinisikan isu, setelah ditentukan permasalahan publik yang ada, permasalahan tersebut kemudian didefinisikan/diartikan
- 4) *Forecasting*
- 5) Penentuan prioritas, dari permasalahan-permasalahan publik yang ada, permasalahan tersebut kemudian ditentukan mana yang paling penting untuk diselesaikan.
- 6) Menganalisis opsi-opsi, setelah ditemukan permasalahan publik yang akan dicarikan solusinya, kemudian melakukan analisis pilihan kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian menentukan kebijakan yang terbaik.
- 7) Mengimplementasikan kebijakan, memonitoring serta mengawasi
- 8) Evaluasi serta *review* kebijakan
- 9) Proses memelihara kebijakan, pemberhentian atau penggantian

Proses pembuatan kebijakan juga dijelaskan oleh (Dunn, 2003:22-24), menurut Dunn, proses pembuatan kebijakan terdiri dari 5 proses yaitu: Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*), Rumusan Kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan.. Penyusunan agenda berarti Pengambil kebijakan menempatkan permasalahan pada agenda publik. Rumusan kebijakan berarti para pejabat terpilih merumuskan alternatif-alternatif dari permasalahan publik yang ada. Adopsi Kebijakan diartikan sebagai proses dimana alternatif yang telah dirumuskan diadopsi. Pelaksanaan program kebijakan berarti kebijakan yang telah dipilih dilakukan oleh masing-masing bagian, kemudian penilaian kebijakan diartikan sebagai proses untuk memeriksa pemerintah, yudikatif, DPR maupun pengadilan telah sesuai dengan aturan yang ingin dituju.

Tahapan proses kebijakan menurut Harold Laswell dalam (Subarsono, 2005) adalah sebagai berikut:

1. Definisi masalah.
Data dan informasi pertanyaan dikumpulkan, diproses, dan didistribusikan.
2. Promosi Pada titik ini, segala upaya akan dilakukan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar memasukkan isu tersebut ke dalam kebijakan publik.
3. Tahap Pengembangan
Pada tahap pengembangan, masalah yang dipilih coba dipecahkan melalui proposal, alternatif dipilih dan dievaluasi.
4. Pengesahan Alternatif
Proses menyetujui atau menyetujui alternatif yang dipilih untuk menjadi kebijakan publik sekaligus menetapkan sanksi terhadap kelompok sasaran pelanggaran kebijakan.
5. Penerapan
6. Perubahan kebijakan publik kelompok sasaran dilakukan pada Tahap Pengakhiran.
7. Evaluasi Mengevaluasi dampak perubahan kebijakan dan mencari faktor-faktor yang akan membuat kebijakan menjadi lebih baik atau menghentikannya.

Strategi Publik menurut Ramlan Subakti dalam Mas Roro Lilik (2009:1) adalah strategi yang menyangkut masyarakat secara keseluruhan. Keputusan politik dipengaruhi oleh kebijakan publik. Pilihan politik adalah pilihan yang mempertimbangkan keputusan yang paling ideal dari struktur pemilu yang berbeda sehubungan dengan permasalahan yang menjadi kewenangan otoritas Publik. Menurut Ramlan Subakti, kebijakan publik merupakan keputusan politik yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sosial.

Pendapat di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan dengan tujuan dan sasaran yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Tindakan-tindakan tersebut kemudian dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dan kemudian dilaksanakan. aturan itu.

1.7.4 Analisis Kebijakan Publik

Carl F 1969 (dalam Agustino, 2008) mengartikan bahwa strategi adalah suatu perkembangan latihan/kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Sedangkan Dye (1978, dikutip dalam Abidin, 2002:20) menegaskan bahwa kebijakan adalah keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Gerston, pakar yang berbeda (1992 dalam Bram Bachelor, 2006: 12:5) mengartikan pendekatan publik sebagai “usaha untuk menentukan isu-isu publik, pertanyaan-pertanyaan yang diterima banyak orang harus dipilih oleh pihak berwenang pada tingkat yang tepat dari masyarakat pemerintahan. , negara bagian atau sekitarnya Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan adalah upaya penyelesaian permasalahan masyarakat yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di semua tingkatan.

Strategi menggabungkan hubungan antara kemauan, aktivitas, dan hasil. Secara bebas, strategi tercermin dalam sikap Otoritas Publik. Kebijakan tercermin dalam tindakan Pemerintah pada tingkat tindakan, dan hasil adalah apa yang sebenarnya dilakukan Pemerintah pada tingkat hasil (Heywood, 1997:382). Kebijakan dapat dijadikan landasan untuk menyusun landasan rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dengan diartikan sebagai wujud penilaian yang dipertimbangkan, menurut definisi lain (Parson, 2001: 15).

Secara khusus, Anderson (1984; Abidin, 2002: 41) mengartikan bahwa strategi publik adalah metodologi administrasi untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, konsep kebijakan publik dibatasi oleh Young dan Quinn (1991, dikutip Suharto, 2005:44) dengan cara sebagai berikut:

1. Tindakan yang Diotorisasi oleh Pemerintah Tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kewenangan hukum, politik, dan keuangan untuk melakukannya disebut sebagai kebijakan publik.
2. Respon terhadap permasalahan dan kebutuhan di dunia nyata. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mengatasi permasalahan atau kebutuhan nyata yang timbul dalam masyarakat.
3. Serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam kebanyakan kasus, kebijakan publik tidak terdiri dari satu keputusan tunggal melainkan sejumlah tindakan atau strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan terbaik rakyat.
4. Pilihan untuk melakukan atau tidak menindaklanjuti sesuatu. Strategi publik sebagian besar merupakan aktivitas agregat untuk mengatasi permasalahan sosial. Namun, kebijakan publik juga dapat dirumuskan dengan asumsi bahwa kerangka kebijakan yang ada akan menyelesaikan permasalahan sosial tanpa memerlukan tindakan khusus.
5. Argumen yang didukung oleh satu atau lebih aktor. Pendekatan publik mengandung penjelasan atau keengganan terhadap langkah-langkah atau rancangan kegiatan yang telah terbentuk, bukan suatu harapan atau komitmen yang belum terealisasi.

Dunn (2003) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai proses pengumpulan informasi tentang proses pembuatan kebijakan. Sementara itu, Quade (1975, dikutip Dunn, 2003: 95) menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah suatu jenis analisis yang menghasilkan dan menyajikan data yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pengambil kebijakan. Dalam pendekatan ujian, teknik keseluruhannya adalah:

- (1) memeriksa,
- (2) penentuan (harapan),

- (3) penilaian,
- (4) saran (remedies), dan
- (5) definisi masalah.

Menurut Person (1995), Strategi dapat dianggap mencapai kesuksesan yang tidak ditentukan oleh SDM, perusahaan, dan asosiasi yang dapat menyelesaikan perancangan ulang. Dalam model proses jaminan strategi dapat direnungkan dari informasi dan hasil. Faktor masukan terdiri dari kebijaksanaan, pergaulan, permintaan, dukungan dan protes. Komponen strategi mencakup pedoman, sosialisasi, realokasi, kapitalisasi, dan kualitas moral. Hasilnya mencakup penerapan, kebijakan, penilaian, legitimasi, perubahan, perubahan, dan penarikan atau penolakan.

Bardach (dalam Tumanggor, 2018) menyatakan bahwa proses pemeriksaan strategi terdiri dari 5 siklus, yaitu: menentukan tujuan dan sasaran kebijakan, merumuskan masalah kebijakan, mengidentifikasi parameter kebijakan, mencari alternatif, dan memilih alternatif. Proses pemeriksaan strategi merupakan suatu kemajuan latihan ilmiah yang dilakukan selama latihan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politik ini seringkali merupakan proses pengambilan kebijakan yang digambarkan sebagai serangkaian tahapan yang saling bergantung dan disusun dalam urutan waktu mulai dari persiapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Pemeriksaan strategi dapat memberikan data yang berkaitan dengan strategi pada satu, beberapa, atau seluruh fase siklus strategi, bergantung pada jenis permasalahan yang ditangani dalam suatu permasalahan. Tujuan dari analisis kebijakan publik adalah untuk memberikan saran yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan publik. Dalam kajian strategi terbuka terdapat data-data yang berkaitan dengan isu-isu publik serta perdebatan mengenai pilihan

pendekatan yang berbeda, sebagai bahan pemikiran atau kontribusi kepada produsen strategi.

Proses tahap ini penulis akan menggunakan teori *bardach* untuk mengaplikasikan teori analisis kebijakan karena dengan output serta metode yang akan digunakan. Kondisi lapangan juga sangat sesuai apabila menggunakan teori analisis kebijakan dari *bardach* yang sistematis dan terstruktur agar dapat lebih maksimal hasil penelitiannya.

1.7.5 Proses Analisis Kebijakan Publik

Menurut Bardach (dalam Tumanggor, 2018) menyebutkan bahwa proses analisis kebijakan terdiri dari 5 proses yaitu: perumusan masalah kebijakan, Penentuan Tujuan dan Sasaran Kebijakan, pengidentifikasian Parameter Kebijakan, Mencari Alternatif-alternatif kebijakan, dan memutuskan Alternatif mana yang paling tepat untuk direkomendasikan.

1. Merumuskan Masalah Kebijakan

Tahap pertama dari analisis kebijakan adalah ini. Membentuk suatu isu adalah suatu pekerjaan yang sangat pedoman dan penting. Sebab, apabila rencana permasalahan tersebut tidak tepat sasaran, maka strategi publik yang akan dijalankan juga tidak tepat sasaran. Penelitian dan pengkajian secara mendalam perlu dilakukan agar dapat dihasilkan sebuah rumusan masalah yang tepat dan akurat. Oleh karena merumuskan masalah seringkali diwarnai oleh motivasi politik tertentu, maka penelitian mendalam diharapkan menjadi dasar obyektif untuk memutuskan apakah sebenarnya masalah yang perlu dipecahkan.

Rumusan kebijakan dapat dilakukan dengan melihat 3 dasar komponen sistem (Hikam 2012), antara lain adalah :

- perangkat keras (hardware) , meliputi infrastruktur sarana prasarana, beban tempat usaha, keberagaman ketersediaan pelayanan, segi komparasi tempat usaha, kemudahan jangkauan, keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan ketertiban.
- perangkat lunak (software), meliputi aturan, norma dan sistem yang telah berjalan.
- manusia pelakunya (brainwawe), meliputi sumber daya manusia baik pemangku kebijakan, pihak ketiga maupun pelaku usaha.

2. Menentukan Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Langkah selanjutnya adalah menentukan maksud dan tujuan setelah masalah dirumuskan secara jelas dan tepat. Tahap ini sangat penting karena menentukan kebutuhan strategi dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Penetapan tujuan dan sasaran ini akan menentukan aturan dan arah kegiatan dalam melaksanakan dan menilai strategi. Hal ini disebabkan maksud dan tujuan akan menjadi landasan dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu kebijakan publik.

Analisis tidak boleh merumuskan tuiuan tanpa mengacu perumusan masalah yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Tujuan yang dirumuskan harus berusaha memecahkan permasalahan yang ada sehingga pemilihan kriteria untuk mengatasi masalah akan sesuai dengan permasalahan. Karena itu, sebelum rancangan kebijakan dibuat maka langkah analisis perumusan tujuan kebijakan menjadi penting dilakukan karena sebagai berikut:

- Untuk memilih alternatif tujuan yang akan dirumuskan dan tujuan yang dipilih untuk dirumuskan sebagai tujuan kebijakan.
- Untuk minimalisasi konflik yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

- Menjadikan acuan untuk kesesuaian tujuan dengan analisis peramalan bagi masa depan kebijakan mengevaluasi pekerjaan pemerintah.

Merumuskan tujuan serta menentukan sebuah sasaran harus menyediakan berbagai pilihan (options) mengenai tujuan dan sebuah sasaran yang akan dan ingin dicapai dari sebuah proposal strategi kebijakan maka para pengambil keputusan nantinya akan disodori oleh suatu pilihan yang lengkap tentang berbagai keputusan yang mungkin diambil. Pada akhirnya penentuan tujuan dan sasaran kebijakan akan menentukan masalah serta menjawab masalah analisis kebijakan.

Dalam analisis perumusan tujuan kebijakan perlu diupayakan kesamaan tujuan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain dalam setiap perumusan tujuan kebijakan perl diupayakan kompromi untuk memperoleh tujuan tunggal. Akan tetapi, apabila persetujuan/ kompromi terhadap tujuan tunggal dalam perumusan kebijakan gagal dirumuskan maka para pengambil kebijakan akan dihadapkan dengan 2 pilihan (Quade, 1984).

- Berusaha menentukan kebijakan yang dinilai lebih baik.
- Apabila pilihan pertama tidak dapat dilaksanakan, maka mengubah pandangan dalam menentukan tujuan yang diharapkan berlaku optimal menjadi tujuan kebijakan yang memuaskan.

Dalam hal ini ada semacam penurunan harapan terhadap tujuan kebijakan yang telah dirancang. Kunci dalam analisis kebijakan publik adalah melakukan identifikasi kebijakan dan tujuan organisasi. Bila tujuan kebijakan/ program belum terumuskan maka informasi tentang alternatif kebijakan, biaya dan dampak yang ditimbulkan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai menjadi tidak ada artinya. Manfaatnya tidak lebih dari

mempertajam analisis perumusan masalah. Pada tahap ini akan di pilih 4 prioritas alternatif kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Rembang dengan metode Teknik Triangulasi.

3. Mengidentifikasi Parameter Kebijakan.

batasan strategi yang signifikan untuk melakukan pengujian atau pengujian terhadap hal-hal yang diselesaikan mengenai proposisi pendekatan. Parameter atau kriteria mutlak diperlukan untuk memilih dan menentukan alternatif. Mengutip pendapat Eugene Bardach, Patton dan Savicky menjelaskan lima batasan yang harus diperhatikan ketika mengembangkan kriteria kebijakan:

- Kelayakan teknis, khususnya apakah pendekatan tersebut mencapai tujuannya. Model ini menggunakan pendekatan prosedur yang ditentukan dan melakukan pengujian terhadap prosedur yang diterima tersebut.
- Kelayakan politik, atau seberapa baik kebijakan tersebut mempengaruhi kekuatan politik seperti legislator, pembuat kebijakan, Koalisi Warga Negara, dan aliansi politik lainnya. Penerimaan, kesesuaian, daya tanggap, dukungan hukum, dan kesetaraan adalah prinsip-prinsip panduannya.
- Biaya dan manfaat ekonomi dari kebijakan terkait dengan kemungkinan ekonomi dan finansial.
- Implementasi kebijakan dalam konteks politik, sosial, dan administratif atau birokrasi disebut sebagai operabilitas administratif. Standar-standar di sini berhubungan dengan kekuasaan, tanggung jawab kelembagaan, kapasitas dan bantuan hierarkis. (Riant Nugroho, 2011:335).
- Komitmen terhadap lingkungan hidup yaitu Menipisnya sumber daya lingkungan akibat penggunaan yang tidak terkendali merupakan bukti adanya tata kelola yang

sadar lingkungan. Kewajiban untuk secara konsisten menyusun analisis dampak terhadap lingkungan hidup, secara konsisten menegakkan hukum lingkungan hidup, dan secara konsisten mengaktifkan lembaga-lembaga pengendalian dampak (Riant Nugroho, 2011: 357).

4. Mencari Alternatif- Alternatif Kebijakan

Tahapan ini memerlukan penelitian yang menyeluruh dan serius. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data, informasi, atau permasalahan terkait dan mengidentifikasi berbagai potensi solusi. Alternatif kebijakan diciptakan untuk mencapai tujuan penelitian dan memecahkan masalah.

5. Memutuskan Alternatif Yang Tepat Dan Sebaiknya Dilakukan Untuk Di

Rekomendasikan

Penetapan pilihan elektif merupakan siklus terakhir dalam pemeriksaan strategi, yang menyiratkan bahwa hasil pemeriksaan strategi adalah usulan strategi yang ditujukan kepada para pemimpin. Rekomendasi kebijakan yang beragam akan lebih baik sehingga pengambil keputusan dapat memilih di antara rekomendasi-rekomendasi tersebut.

1.7.6 Pariwisata

Kata Sansekerta "pari", yang berarti "banyak", memberi arti harfiah pada istilah "pariwisata". beberapa kali; bolak-balik, istilah "wisata" yang merujuk pada perjalanan; bepergian. Dalam bahasa Inggris pariwisata disebut sebagai "Tour" dan kamus mengartikannya sebagai "perjalanan atau perjalanan untuk kesenangan mengunjungi berbagai tempat menarik" atau "kunjungan singkat atau kunjungan melalui suatu tempat" (Spillane, 2001: 22) .

Destinasi wisata wisata dicirikan sebagai suatu usaha yang memberikan kemudahan dan administrasi kepada wisatawan (Destinasi wisata). Menurut Kodyat (1983), pariwisata adalah perjalanan atau persinggahan yang dilakukan seseorang di luar negara asalnya karena berbagai alasan, namun bukan untuk menetap di sana secara permanen atau bekerja di sana untuk mendapatkan upah (Santoso: 2006).

Perekonomian yang cepat dalam hal posisi terbuka, gaji, gaya hidup dalam memberlakukan area penciptaan lainnya dalam pertemuan wisatawan (Gromang, 2003). Wisata juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau kegiatan yang mencakup tamasya yang dapat dilakukan dalam waktu kurang dari satu hari (jet-setter/tamu) atau juga tamasya dalam batas umum yang biasa disebut dengan homegrown wisatawan, atau bisa juga berarti tamasya antar negara. yang didelegasikan sebagai perjalanan wisata global.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 yang termuat dalam bab 1 pasal 1, yang dimaksud dengan “wisatawan” adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke tempat lain dengan tujuan menikmati pengalaman. (Spillan: 2001). Spillane mendefinisikan wisatawan sebagai “pengunjung sementara” yang menghabiskan setidaknya 24 jam di suatu negara dan melakukan perjalanan karena alasan berikut (Spillane, 2001):

- 1) Perjalanan adalah untuk tujuan hiburan, liburan, kesejahteraan, belajar, olahraga dan olah raga.
- 2) Hubungan pertukaran, anggota keluarga, sahabat, pertemuan dan misi.

Istilah "turis" mengacu pada sekelompok orang yang mengunjungi suatu lokasi untuk tujuan pariwisata tetapi tidak tinggal di sana atau bekerja di sana untuk mencari nafkah.

1.7.7 Pengembangan Pariwisata

Pembangunan pariwisata harus dilakukan bersamaan dengan sektor pembangunan lainnya karena merupakan komponen pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sunaryo dalam (Sulastri, 2017:1) menyatakan bahwa perbaikan destinasi wisata merupakan suatu siklus yang dilakukan oleh masyarakat secara terorganisir menuju destinasi wisata yang dipandang kurang besar menuju kondisi destinasi wisata yang lebih baik. Swabroke (1996:99) menyatakan bahwa pengembangan destinasi wisata adalah serangkaian atau upaya untuk melakukan rekonsiliasi dalam pemanfaatan aset-aset destinasi wisata yang berbeda, mengkoordinasikan semua jenis sudut pandang di luar destinasi wisata yang terhubung secara langsung atau tersirat. tentang pemeliharaan destinasi wisata (Purba, 2018). Selain itu, kemajuan pesat dalam destinasi wisata dapat berdampak pada perekonomian lokal serta meningkatkan pendapatan perdagangan asing dan mengurangi pengangguran.

Menurut Yoeti (Ginting & Suryawan, 2018:3), pengembangan pariwisata meliputi: pengembangan destinasi wisata memerlukan kehati-hatian dari beberapa sudut pandang, yaitu wisatawan, transportasi, atraksi/objek wisatawan, perkantoran, data dan kemajuan, serta pemikiran. strategi". Agar berhasil mencapai dan melaksanakan pembangunan pariwisata di suatu daerah, perlu dipahami perbedaan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Joyosuharto (1995 dalam (Kamaru et al., 2017: 4) menyatakan bahwa pembangunan pariwisata berfungsi sebagai mempunyai tiga tujuan, yaitu: 1) meningkatkan perekonomian, 2) menjaga jati diri bangsa dan fungsi serta kualitas lingkungan hidup, dan 3) menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Penegasan ini menunjukkan bahwa setiap daerah mempunyai kemungkinan berbeda-beda yang harus ditumbuhkan lebih lanjut dengan penuh niat dalam memenuhi kebutuhan

daerah setempat untuk kantor hiburan, hiburan keluarga dan akan memberikan pintu terbuka bagi pekerjaan di daerah sekitarnya.

1.7.8 Komponen Pengembangan Pariwisata

Dalam melakukan pariwisata, ada beberapa unsur-unsur penting dalam komponen pengembangan pariwisata yang harus diperhatikan. *Edward inskeep (1991:27)* menyebutkan komponen pariwisata terdiri dari 5 unsur yaitu:

1. *Attraction* (daya tarik)

Segala sesuatu dalam suatu kawasan wisata yang dapat menarik pengunjung untuk mengunjungi suatu objek wisata adalah daya tarik wisata. Atraksi wisata alam, atraksi wisata buatan, hingga perilaku manusia termasuk topik menarik yang dibahas. Melalui objek wisata ini pengunjung bisa melihat pemandangan yang tidak biasa.

2. *Accessibility* (Aksesibilitas/prasarana)

Akses dalam pariwisata merupakan hal penting dalam pariwisata yang berkaitan dengan bagaimana wisatawan mencapai objek wisata dengan nyaman dan aman. Hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam memilih objek wisata serta sarana transportasi yang dimiliki juga berpengaruh signifikan, seperti jalanan, transportasi dan komunikasi.

3. *Accommodation* (akomodasi/sarana)

Akomodasi merupakan tempat wisatawan penunjang wisatawan untuk istirahat sejenak ketika berkunjung. Sarana akomodasi yang diharapkan tentu bersih, profesional dan ramah. Jenis akomodasi biasanya seperti penginapan hotel, homestay, perkemahan, villa dan lainnya.

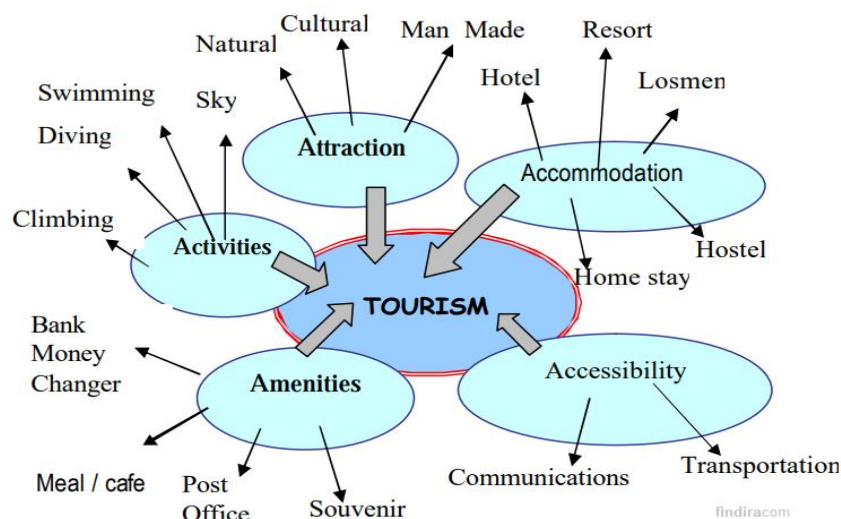
4. *Amenities* (Amenitas/infrastruktur)

Amenitas merupakan segala bentuk fasilitas yang diberikan kepada wisatawan selama mereka sedang berwisata di tujuan wisata dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dimana wisatawan tidak hanya membutuhkan objek alam namun diikuti oleh prasarana dan sarana yang mendukung, meliputi restoran, toko souvenir, pusat kesehatan, toilet umum, keamanan dan bank.

5. *Ancillary Service* (Pelayanan Tambahan/masyarakat, lingkungan,budaya)

Pelayanan tambahan atau disebut faktor pendukung merupakan sesuatu fasilitas yang disediakan oleh daerah tujuan wisata untuk para pengunjung maupun pelaku wisata. Biasanya hal ini adalah sikap masyarakat setempat dalam memberikan informasi kepada wisatawan. Bagaimana masyarakat setempat juga menentukan bagi wisatawan untuk berkunjung.

Gambar 1. 3
5 komponen utama dalam Pariwisata

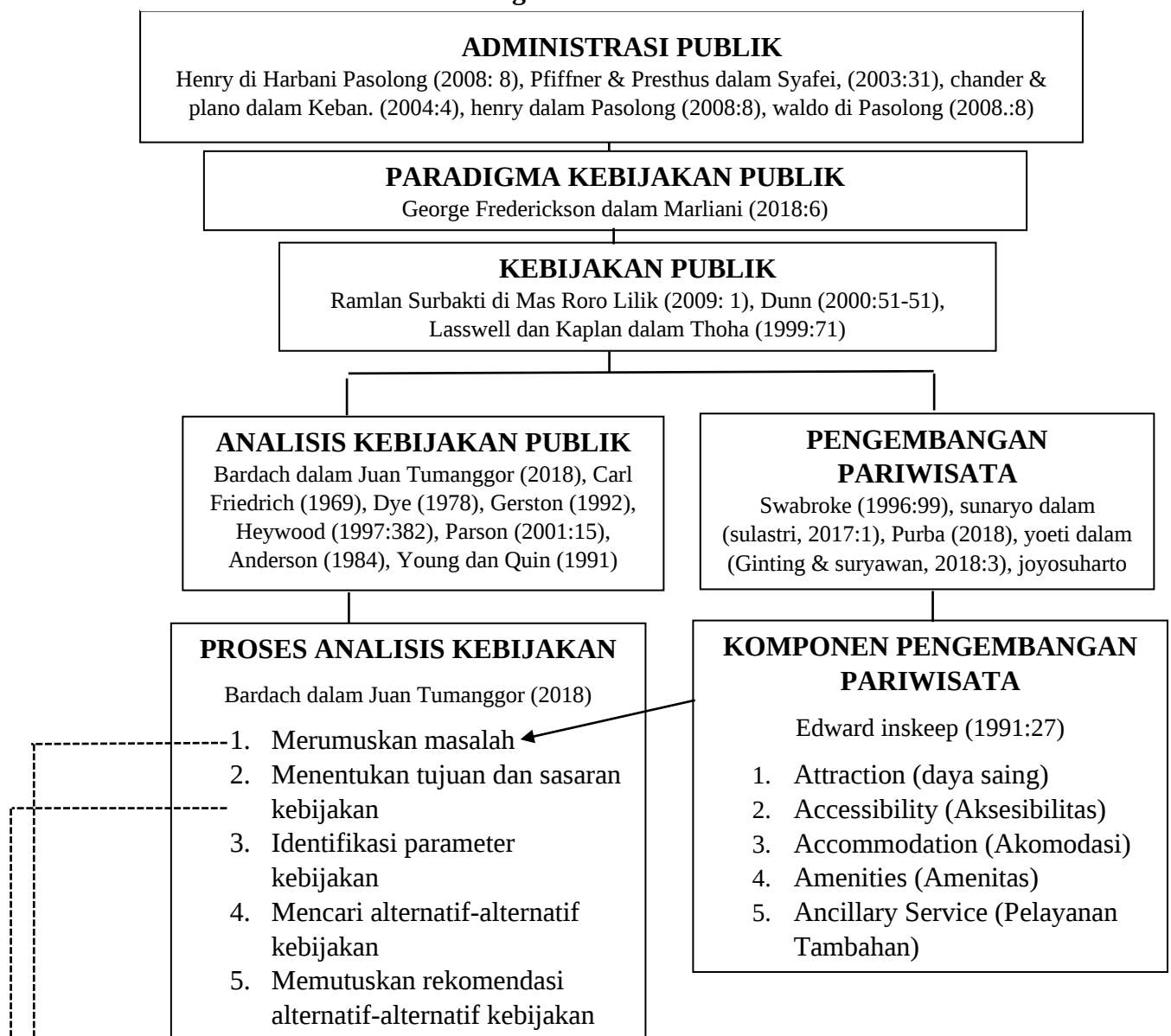


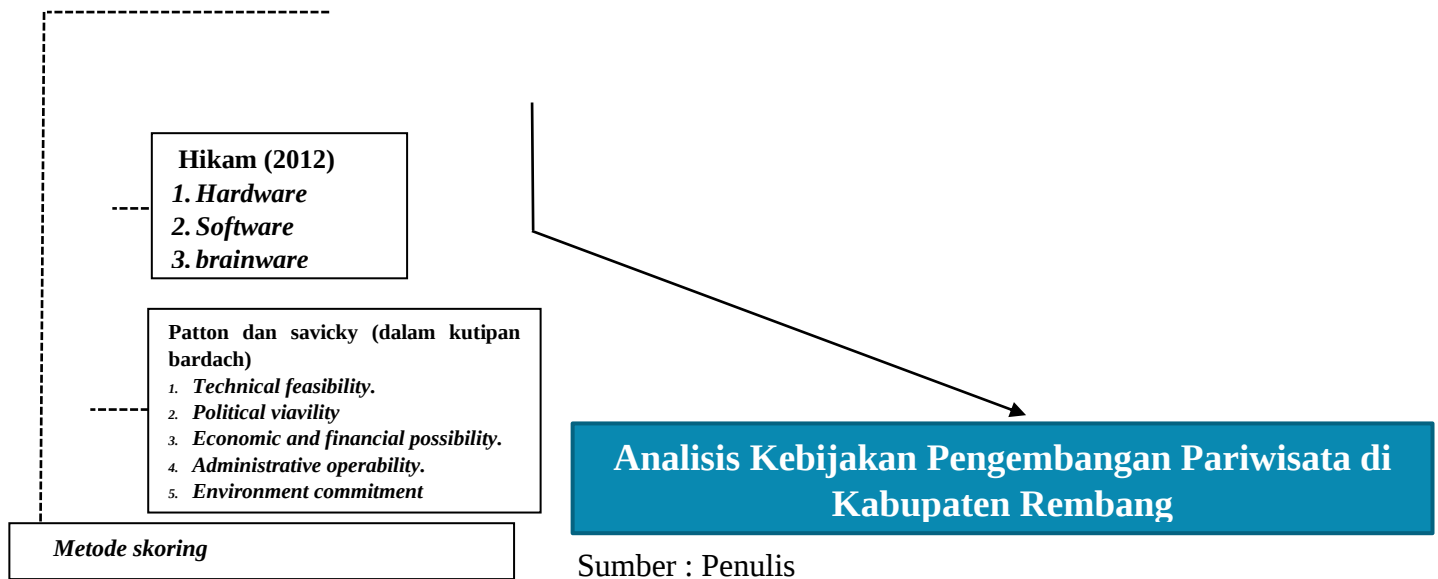
Sumber: (Findira.com, 2021)

1.7.9 Kerangka Pemikiran

Struktur Penalaran merupakan gambaran permasalahan yang memahami jenis hubungan antar faktor dalam pemeriksaan. Tahapan ini dilakukan untuk membentuk isu yang sedang hangat sehingga eksplorasinya terpusat dan tidak luput dari pokok permasalahan. Proses analisis kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang menjadi fokus utama penelitian ini.

Gambar 1. 4
Kerangka Pemikiran Teoritis





1.7.10 Definisi Konsep

Definisi yang masuk akal merupakan komponen eksplorasi yang memahami kualitas suatu isu untuk dipertimbangkan. Singarimbun dan Efendi menyatakan bahwa definisi yang masuk akal merupakan pedoman bagaimana suatu variabel dapat diperkirakan, dengan cara membaca definisi fungsional dalam penelitian dan menyesuaikannya di lapangan. Definisi konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Di Kabupaten Rembang, analisis kebijakan pembangunan pariwisata merupakan suatu tindakan yang disarankan kepada seseorang, kelompok, atau pemerintah dengan mempertimbangkan tantangan dan peluangnya. Seseorang atau kelompok diharapkan dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan mengatasinya guna mencapai tujuan tertentu. Memanfaatkan hipotesis Bardach tentang Analisis Kebijakan publik (2018), tahapan pemeriksaan strategi meliputi: merencanakan permasalahan strategi, menentukan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi parameter kebijakan, mencari pilihan, dan menentukan pilihan pendekatan.
- b. Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Rembang bertujuan untuk dapat meningkatkan embrio wisata di Kabupaten Rembang untuk menjadi destinasi wisata yang lebih dikenal banyak orang dan menjadi wisata prioritas khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan Teori Komponen pengembangan pariwisata Edward Inskeep (1991:27) antara lain : *Attraction* (daya Tarik), *Accesibility* (Aksesibilitas/prasarana), *Accomodation* (akomodasi/sarana), *Amenities* (Amenitas/infrastruktur), *Ancillary Srvce* (Pelayanan Tambahan/masyarakat, lingkungan, budaya).

1.7.11 Operasionalisasi Konsep

Fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah suatu studi analisis kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang. Berangkat dari teori analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Bardach (merumuskan masalah, menentukan tujuan, identifikasi parameter, mencari alternatif dan memutuskan alternatif) kemudian diuraikan dalam Teori unsur komponen pengembangan pariwisata oleh Utami (daya saing, aksesibilitas, akomodasi, amenitas, pelayanan tambahan) . Meliputi :

1.7.11.1 Merumuskan Masalah Kebijakan

Masalah yang muncul dalam analisis kebijakan pengembangan pariwisata ini adalah:

- a. Terjadi penurunan pertumbuhan kunjungan wisatawan dan pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang
- b. Belum optimalnya kebijakan retribusi sektor pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Rembang
- c. Belum terpadunya strategi pemasaran pariwisata dalam membuat *city branding master of point interest* pariwisata di Kabupaten Rembang

Rumusan kebijakan dapat dilakukan dengan melihat 3 komponen dasar (Hikam, 2012) antara lain :

1. Perangkat keras (hardware), yaitu mengidentifikasi substansi permasalahan dari kondisi fisik dengan unsur komponen pengembangan pariwisata antara lain :
 - a. Aksesibilitas :
 - Mudahnya sarana transportasi menuju tempat wisata

- Sarana prasarana di tempat wisata yang cukup dan layak
- Jaringan komunikasi yang aman
- Lampu penerangan jalan umum yang cukup
- Akses jalan ke tempat wisata yang mudah serta kondisi baik
- Memiliki tempat parkir yang memadai dan aman
- Adanya Petunjuk arah menuju ke tempat wisata

b. Akomodasi :

- Tersedianya Hotel
- Tersedianya Villa
- Tersedianya Penginapan

c. Amenitas :

- Adanya fasilitas ATM / Perbankan
- Tersedianya Restoran di sekitar tempat wisata
- Tersedianya Café di sekitar tempat wisata
- Terdapat Toko oleh-oleh
- Terdapat Pos keamanan di area tempat wisata

2. Perangkat lunak (Software), yaitu aturan dan norma serta nilai yang menjadi aturan main dalam analisis kebijakan pengembangan pariwisata dengan unsur komponen pengembangan pariwisata antara lain :

Daya saing :

- *Event* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang berkaitan dengan pengembangan pariwisata
- Strategi kebijakan pengembangan pariwisata dari pemangku kebijakan (Pemerintah)

- Strategi kebijakan peningkatan retribusi pariwisata dari pemangku kebijakan
- Inovasi pemasaran dalam meningkatkan minat pariwisata
- Upaya Peningkatan daya Tarik obyek wisata
- Visi misi pengembangan pariwisata
- Pengalokasian Anggaran untuk pengembangan pariwisata

3. Manusia pelakunya (barainware), yaitu sumber daya manusia baik pemangku kebijakan, pihak ketiga, maupun pelaku usaha dengan unsur komponen pengembangan pariwisata antara lain :

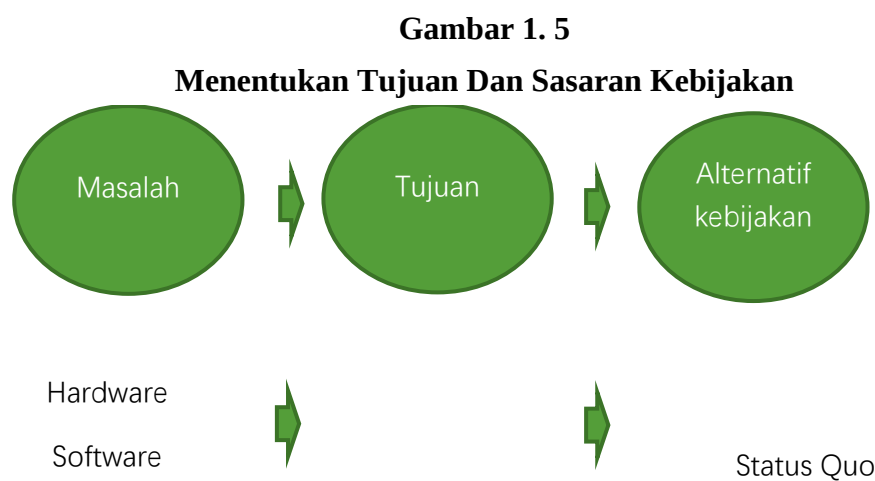
Pelayanan Tambahan

- Kemampuan SDM pemangku kebijakan
- Inovasi pengembangan pariwisata oleh Pemerintah, masyarakat dan swasta
- Etos kerja Pegawai Pemerintah, dan pengelola tempat wisata
- Budaya menghargai wisatawan
- Kultur dan budaya di area tempat wisata
- SDM pengelola pariwisata

1.7.11.2 Menentukan Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Merumuskan tujuan serta sasaran dengan tehnik Triangulasi serta dengan menyediakan berbagai pilihan (options) tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari sebuah proposal kebijakan, maka para pengambil keputusan nantinya akan disodori oleh pilihan yang lengkap tentang berbagai keputusan yang mungkin diambil. Tujuan itu sendiri akan diambil dari hasil penelitian dilapangan dengan cara

wawancara dengan para narasumber, sehingga munculnya beberapa tujuan yang sesuai dengan Sub Hardware, Software dan Brainware maka akan di lanjutkan kedalam tahap selanjutnya, dalam tahap ini isu yang akan diunggah akan diambil maksimal 4 permasalahan yang sesuai tujuan dan sasaran kebijakan, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan di Status Quo atau tidak akan dipakai dalam pengambilan kebijakan atau ke tidak akan dimasukkan ke tahap selanjutnya. Pada akhirnya penentuan tujuan dan sasaran kebijakan akan menentukan masalah serta menjawab masalah analisis kebijakan.



Sumber : Diolah Peneliti, 2022

1.7.11.3 Mengidentifikasi Parameter Kebijakan

Mengutip pendapat Eugene Bardach, Patton dan Savicky menjelaskan lima batasan yang harus diperhatikan ketika mengembangkan kriteria kebijakan:

1. *Technical feasibility.*
2. *Political viability.*
3. *Economic, and finansial possibility.*
4. *Administrative operability.*
5. *Environment commitment.*

Identifikasi parameter menjadikan beberapa pilihan alternatif kebijakan akan dikembangkan kedalam hal-hal yang akan dihadapi dalam mendesain kebijakan, pada tahap ini pola pengembangan itu akan di eksklusifkan kedalam 5 hal yang akan dihadapi atau yang akan mempengaruhi. Teori Paton dan Savinsky ini sangat cocok untuk mendetailkan parameter kebijakan karena berbasis keilmuan kebijakan publik murni.

1.7.11.4 Mencari Alternatif – Alternatif Kebijakan

Alternatif kebijakan diciptakan untuk mencapai tujuan penelitian dan memecahkan masalah. Untuk melakukan pengujian alternatif, perlu juga ditetapkan skala nilai untuk setiap pilihan kebijakan. Skala ini dapat digunakan untuk menghitung penilaian alternatif kuantitatif. Pada tahap ini penulis akan mengidentifikasi alternatif-alternatif pilihan yang telah di prioritaskan menjadi 4 point dengan kriteria-kriteria pada identifikasi parameter. Sehingga akan muncul kesesuaian-kesesuaian yang akan digunakan peneliti untuk memutuskan manakan alternatif ;ilihan paling prioritas sampai dengan alternatif pilihan paling terakhir.

1.7.11.5 Memutuskan Alternatif Yang Sebaiknya Diambil untuk Rekomendasi

Pada tahap ini penulis telah mendapatkan urutan-urutan prioritas kriteria analisis kebijakan yang paling sesuai untuk diusulkan, pada tahap ini peneliti dibantu dengan Metode scoring berawal dengan melakukan tahapan interview kepada para informan sehingga akan muncul penilaian yang akan ditentukan oleh penulis sesuai dengan skala point 1 sampai dengan 4, kemudian akan diurutkan sesuai dengan kesesuaian pada masing-masing kriteria yang terdapat pada identifikasi parameter. Alternatif kebijakan diciptakan untuk mencapai tujuan penelitian dan memecahkan masalah. Untuk melakukan pengujian alternatif, perlu juga ditetapkan skala nilai untuk setiap pilihan

kebijakan. Skala ini dapat digunakan untuk menghitung penilaian alternatif kualitatif.

Maka hal yang akan dilakukan:

- Penyajian alternatif kebijakan dengan metode skor
- Membuat atau menentukan langkah- langkah terhadap alternatif kebijakan terpilih.
- Membuat atau menentukan langkah- langkah implementasi

Tabel 1. 7
Metode Skoring

No	Identifikasi parameter dan sub-Kriteria	Bobot (%)	Skor pada Alternatif Kebijakan antara 1-4 sesuai dengan kesesuaian dengan kriteria			
			Pengalokasian anggaran untuk pengembangan pariwisata	Akses jalan dan penerangan jalan	Event/Produk Wisata	Inovasi Pengembangan Pariwisata
1	KELAYAKAN TEKNIS					
	Efektifitas	10				
	Kecukupan	10				
Jumlah = bobot x skor						
2	KEMUNGKINAN EKONOMI DAN FINANSIAL					
	Efisiensi ekonomi	5				
	Keuntungan	5				
	Efisiensi biaya	10				
Jumlah =bobot x skor						
3	KELAYAKAN POLITIK					
	Tingkat penerimaan	5				
	Kepantasan	5				
	Daya tanggap	2,5				

	Legal	2,5				
	Keadilan	5				
Jumlah = bobot x skor						
4	KELAYAKAN ADMINISTRASI					
	Otoritas	5				
	Komitmen institusi	5				
	Kapasitas	5				
	Dukungan organisasi	5				
Jumlah = bobot x skor						
5	KESADARAN LINGKUNGAN	20				
Jumlah = bobot x skor						
	JUMLAH TOTAL	100%				

Sumber : *Method Scoring William Dunn, Pada Skripsi Farih 20222*

Didalam tahap ini peneliti menggunakan teori tambahan dari William Dunn tentang methode Skoring, dimana tujuan penggunaan metode ini untuk membantu dan memudahkan peneliti untuk mengurutkan alternatif-alternatif prioritas yang paling sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada pada Identifikasi Parameter Kebijakan. Tentu perhitungan ini menggunakan skema kualitatif yang dibantu dengan urutan nomor 1 sampai dengan 4 untuk mengurutkan alternatif yang paling sesuai dengan kriteria sampai dengan yang kurang sesuai. Kemudian prosentasi 20% pada setiap Identifikasi Parameter merupakan nilai rumus yang dikemukakan William dunn untuk menghitung selisih-selisih kecil yang mungkin terjadi.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland (Moleong, 2017), sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau kegiatan, dan informasi tambahan seperti pertemuan, arsip, dll. Untuk memperoleh informasi subjektif, ilmuwan memerlukan dua sumber informasi. Sumber informasi penting dan informasi opsional. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari sumber yang ada, sedangkan data primer adalah data yang peneliti peroleh secara langsung (dari sumber tangan pertama).

1) Data Primer Data primer adalah data penelitian yang bersumber langsung dari sumber aslinya. Contoh data primer antara lain jajak pendapat, wawancara, dan observasi terhadap suatu objek, peristiwa, atau hasil tes. Informasi penting dalam pemeriksaan ini adalah hasil pertemuan dengan beberapa narasumber yang terkait dengan kemajuan industri pariwisata di Kabupaten Rembang dengan Dinas Pariwisata sebagai Saksi Kunci.

2) Data Sekunder Buku, catatan, bukti-bukti yang ada, dan arsip-arsip baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan secara umum merupakan contoh data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder penelitian ini berasal dari makalah terkait penelitian, peraturan, hasil penelitian, tesis, disertasi, jurnal, berita, dan informasi online. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang, Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang, Buku Statistik Pariwisata Kabupaten Rembang, dan penelitian terdahulu terkait merupakan data sekunder dari penelitian ini. Laporan aktivitas hari tur juga merupakan data sekunder.

1.8.2 Fokus / Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat kantor Bupati, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dan tempat wisata yang menjadi destinasi Pariwisata

Kabupaten Rembang. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian ini adalah kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. Bagaimana Keterkaitan Lima Komponen Pengembangan Pariwisata pada pengembangan Pariwisata di Kabupaten Rembang ?
2. Merumuskan Rekomendasi Alternatif kebijakan yang tepat untuk menyempurnakan Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Rembang.

1.8.3 Pemilihan Informan

Orang yang terbiasa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, latar belakang penelitian disebut informan. Oleh karena itu, informan harus memiliki pengetahuan yang luas tentang latar penelitian. Sekalipun partisipasinya hanya bersifat informal, informan wajib menjadi sukarelawan untuk bergabung dalam tim peneliti. Informan dapat memberikan sudut pandang orang dalam mengenai nilai, sikap, bangunan, proses, dan budaya yang menjadi latar belakang penelitian sebagai anggota tim berkat kebaikan dan kemauannya (Lexi Moleong, 2010: 132). Dengan demikian, analis akan memanfaatkan sumber untuk memperoleh data berbeda yang diperlukan selama interaksi pemeriksaan. Sumber penelitian dipilih berdasarkan prosedur yang bertujuan, khususnya dengan mencari saksi-saksi kunci. Yang dimaksud dengan saksi kunci adalah orang-orang yang mengetahui dan mempunyai berbagai data penting yang diperlukan dalam eksplorasi atau sumber-sumber yang mengetahui secara top to bottom permasalahan yang sedang diselidiki.

Tabel 1. 8
Informan Penelitian

INFORMAN PENELITIAN			
No	Jabatan /Posisi	Alasan Memilih Informan	Jumlah
1	Bupati Rembang	Pemegang kebijakan di lingkungan Pemerintah daerah	1
2	Sekretaris Daerah	Ketua TAPD	1
3	Kepala Dinas Pariwisata	Pejabat yang menangani kebijakan pariwisata secara langsung	1
INFORMAN PENELITIAN			
4	Kepala Dinas Komunikasi	Pengembangan <i>city branding</i>	1
5	Kepala BAPPEDA	Sekretaris TAPD, dan memiliki peran penting untuk perencanaan pengembangan pariwisata	1
6	Kabid pemasaran dinbudpar	Pejabat yang menangani langsung kebijakan dari pimpinan yang lebih tinggi	1
7	Kasi pengembangan obyek wisata	Pejabat yang menganalisis data dan kebijakan	1
8	Staf dinbudpar	Pelaksana kebijakan pengembangan wisata	1
9	LSM bergerak di bidang Wisata	Masyarakat yang memiliki perhatian lebih kepada pengembangan pariwisata	1
10	Masyarakat	Pengunjungan wisata dan pengurus wisata	4
Total			12

Sumber : Diolah Peneliti, 2022

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

a. Wawancara

Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui persepsi, cara pandang, proses berpikir, dan interpretasi masyarakat terhadap permasalahan penelitian. Peneliti dan responden dapat berkomunikasi secara langsung melalui wawancara. Dalam hubungan tatap muka, komunikasi berbentuk tanya jawab, sehingga gerak dan ekspresi responden merupakan pola media pelengkap kata-kata verbal. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara terstruktur, dengan tetap menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelum terjun ke lapangan dan menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk dijadikan sumber.

b. Observasi

Observasi adalah observasi yang disengaja dan metodis terhadap fenomena sosial yang menunjukkan gejala-gejala psikologis untuk tujuan penelitian selanjutnya. Bungin (2007:115) mengemukakan beberapa jenis persepsi yang dapat digunakan dalam pemeriksaan subjektif, yaitu persepsi anggota, persepsi yang akan datang atau rahasia, dan persepsi tidak terstruktur. Observasi penelitian ini tidak terstruktur karena peneliti mengamati langsung kejadian di lapangan untuk mengamati bagaimana kapasitas kelembagaan dikembangkan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2013:158) “Dokumentasi adalah mencari informasi mengenai hal-hal atau faktor-faktor seperti buku, majalah, arsip, pedoman, notulensi rapat, jurnal, dan sebagainya.” Dalam penelitian ini, peneliti dapat menggunakan dokumen-dokumen aktual yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mengumpulkan data. Struktur yang ditemukan para ilmuwan dalam pengumpulan informasi untuk eksplorasi ini meliputi informasi visi dan misi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang, Pedoman Resmi dan

Pedoman Provinsi yang terkait dengan kemajuan industri pariwisata dan arsip penilaian kelembagaan di Dinas Pariwisata Pemerintahan Rembang.

1.8.5. Keabsahan Data

Metode pengecekan legitimasi informasi tidak hanya sekedar mendiskreditkan apa yang ditudingkan sebagai ide pemeriksaan subjektif yang mengatakan bahwa eksplorasi ini tidak bersifat logis, namun prosedur pengecekan legitimasi informasi ini merupakan suatu tahapan yang tidak bisa dipisahkan dari proses tersebut. pengumpulan informasi dalam pemeriksaan subjektif. Uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji ketergantungan, dan uji konfirmabilitas merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memverifikasi keabsahan data (Lincoln dan Cuba, 1988).

Dalam pemeriksaan ini digunakan keabsahan prosedur uji validitas (Believability). Validitas internal mengacu pada kredibilitas dalam penelitian kuantitatif. Jika terdapat kesejajaran antara apa yang dikatakan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian, maka data tersebut dapat dianggap kredibel dalam penelitian kualitatif. Ketika ditemukan di lapangan bahwa infrastruktur di kawasan wisata belum memadai, maka peneliti akan lebih fokus pada persoalan infrastruktur yang belum memadai dibandingkan persoalan lainnya.

Pengujian kredibilitas informasi atau reliabilitas informasi pemeriksaan subjektif meliputi perluasan persepsi, perluasan kemantapan, triangulasi, investigasi kasus negatif, pemanfaatan bahan referensi dan pengecekan bagian:

a) Pengamatan ekstensif

Pada awal keterlibatan peneliti di lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing dan patut dicurigai. Akibatnya, informasi yang diberikan kurang rinci dan tidak

lengkap, dan mungkin saja banyak informasi yang dirahasiakan. Dengan memperluas observasi ini berarti peneliti dan narasumber akan menjalin rapport, semakin mesra (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka satu sama lain, dan saling percaya sehingga tidak ada lagi informasi yang tercecer. terus disembunyikan. Jika afinitas telah dibingkai, maka telah ada kesusilaan dalam pemeriksaan, dimana kehadiran ilmuwan tidak lagi menghalangi cara berperilaku yang dipertimbangkan. Dengan memperluas pengamatan untuk menguji kebenaran data penelitian, khususnya dengan menentukan akurat atau tidaknya data yang diperoleh sebelumnya ketika dicek kembali di lapangan. Apabila setelah kembali ke lapangan ternyata benar, artinya dapat dipercaya, maka pada saat itulah ilmuwan dapat mengakhiri jangka waktu persepsi yang telah diperpanjang. Sebagai bentuk konfirmasi bahwa spesialis telah menyelesaikan uji validitas, ilmuwan dapat menggabungkan bukti sebagai dukungan atas persepsi yang diperluas dalam laporan pemeriksaan.

b) Meningkatkan ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunannya dengan cara memeriksa kembali apakah data yang ditemukannya benar dengan membaca berbagai referensi buku dan hasil penelitian atau dokumentasi terkait, melakukan observasi terus menerus, dan sebagainya. Hal ini akan memperluas dan mempertajam wawasan peneliti. Misalnya, jika melihat sekelompok orang yang berolahraga di pagi hari, sebagian orang hanya melihatnya sebagai cara untuk menjaga kesehatan fisik. Namun setelah melakukan penelitian mendalam, mungkin peneliti akan sampai pada kesimpulan bahwa olahraga pagi juga bisa menjadi salah satu cara berbisnis.

c) Triangulasi

Ide sistemis dalam pemeriksaan subjektif yang perlu diketahui oleh para ilmuwan subjektif adalah metode triangulasi. Kekuatan teoritis, metodologis, dan interpretatif penelitian kualitatif ditingkatkan melalui triangulasi. Triangulasi juga ditandai dengan tindakan menganalisis informasi melalui berbagai sumber, metode, dan waktu. Dengan menggunakan berbagai metode, data dari sumber yang sama dapat diperiksa untuk triangulasi. Misalnya informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber A mengenai kebijaksanaan, pemikiran, kepercayaan, cara pandang, cara hidup dan iklim daerah setempat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis, datanya benar-benar dilihat. lagi melalui persepsi, atau dokumentasi dengan saksi A, begitu pula sebaliknya.

1. Percakapan mendalam: Mayoritas data penelitian kualitatif berasal dari wawancara mendalam, yang menggunakan pertanyaan terbuka untuk fokus pada sikap etis informan. Persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan merupakan data yang dikumpulkan.
2. Observasi: Dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia, observasi merupakan salah satu landasan fundamental dari semua metode pengumpulan data. Persepsi ini dilengkapi dengan melihat apa yang digali, yang dampaknya dapat berupa gambaran di lapangan berupa mentalitas, aktivitas, diskusi dan kerjasama relasional.
3. Dokumen: Dokumen adalah sumber data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Bisa berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), atau karya monumental yang memberi informasi pada proses penelitian. Dengan asumsi strategi yang berbeda menghasilkan informasi yang tidak sama, maka analisis

dapat menyelesaikan pembicaraan lebih lanjut dengan sumber informasi yang terhubung hingga informasi tersebut dapat dipastikan dan benar.

d) Memanfaatkan bahan referensi

Bahan referensi penting untuk membantu menunjukkan secara sah informasi yang ditemukan oleh analis. Misalnya, informasi dari pertemuan tingkat atas hingga bawah dengan para saksi digabungkan dengan laporan media umum selama wawancara internal dan eksternal.

e) Member check Member check merupakan prosedur membandingkan data dengan berbagai sumber. Alasan dilakukannya pemeriksaan sebagian adalah agar data yang diperoleh dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan yang diharapkan oleh sumber informasi atau saksi. Bagian pengamatan dapat disampaikan setelah berakhirnya periode pengumpulan informasi. Komponen tersebut dapat dilakukan secara terpisah, yaitu spesialis bertemu dengan sumber informasi atau bertemu dalam diskusi perbincangan berkumpul. Sumber data dapat menambah, mengurangi, atau menolak data selama proses ini hingga keduanya mencapai kesepakatan yang dapat berupa dokumen yang ditandatangani.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, pendekatan teknis kualitatif digunakan untuk teknik analisis data. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Wekke Suardi, 2019:93), kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai, atau hingga data jenuh. Merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya ke dalam

satuan-satuan, menyusunnya menjadi pola-pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain serta Latihan pemeriksaan informasi, khususnya penurunan informasi, pertunjukan informasi, dan pemeriksaan gambar akhir, khususnya:

1. Reduksi Data Proses interpretasi data atau informasi yang diperoleh dari catatan lapangan, observasi, dan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian atau informan disebut dengan reduksi data. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dengan mencari tema dan pola, menulis dan merangkum catatan lapangan, memilih hal yang paling penting, dan memusatkan perhatian pada hal yang penting.

2. Penyajian Data

Setelah informasi sudah dikurangi, tahap selanjutnya adalah memperkenalkan informasi tersebut. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan, dan pengelompokan atau kategori. Dengan menyajikan data, Anda akan mudah memahami apa yang terjadi, sehingga Anda dapat merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Analisis Data

Tahap Analisis Data adalah dimana data akan diolah untuk menemukan informasi berguna yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Setelah data disajikan maka tahap Analisis Data akan dimulai.

4. Penarikan Kesimpulan

Kemudian tahap terakhir adalah mencapai determinasi. Tahap ini merupakan tahap tingkat tinggi dimana para ilmuwan melakukan penentuan berdasarkan

penemuan yang ada. Peneliti meninjau kembali data yang telah direduksi untuk mempertimbangkan signifikansi data yang dianalisis dan implikasinya terhadap pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Bardach. Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Bardach dalam Juan Tumanggor (2018) adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap rumusan masalah / identifikasi masalah Hardware, Software, dan Brainware, (Hikam 2012)
- 2) Tahap penentuan tujuan dan sasaran
- 3) Tahap identifikasi parameter (Patton dan Savicky dalam kutipan Bardach, yaitu Technical feasibility, Political viability, Economic and financial possibility, Administrative operability, Environment commitment)
- 4) Tahap mencari alternatif
- 5) Tahap memutuskan alternatif (menggunakan *method scoring*)

Kemudian, untuk melihat unsur-unsur pengembangan pariwisata dalam penelitian ini menggunakan teori dari Edward Inskeep (1997:21) sebagai berikut :

- 1) *Attraction* (daya Tarik)
- 2) *Accessibility* (Aksesibilitas)
- 3) *Accommodation* (akomodasi)
- 4) *Amenitas* (Amenitas)
- 5) *Ancillary Service* (Pelayanan Tambahan)

1.8.7. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian analisis kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Rembang, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Selain itu, panduan wawancara berisi sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari responden. Selain itu

pedoman dokumentasi yang memuat data-data yang dikumpulkan peneliti selama penelitian dan pedoman observasi yang memuat pengamatan terhadap keadaan atau kondisi yang berkaitan dengan Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Rembang. Maksud dari instrumen dalam eksplorasi ini secara eksplisit adalah bekerja dengan penggalian, informasi yang lebih boros dan lebih mendalam.

1.8.8. Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian adalah fakta yang ditemui di lapangan atas dasar permasalahan dan isu terkait Analisis Kebijakan Pengembangan pariwisata. Fenomena pengamatan dibagi menjadi Fenomena, Sub Fenomena dan Operasionalisasi. Fenomena merupakan turunan dari tujuan penelitian. Sub Fenomena merupakan turunan dari teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Operasionalisasi merupakan aspek-aspek spesifik yang akan ditinjau lebih dalam di lapangan oleh peneliti. Berikut adalah fenomena pengamatan dalam penelitian ini.

Tabel 1. 9
Fenomena Pengamatan

FENOMENA	SUB FENOMENA	OPERASIONALISASI
Pariwisata		
Komponen Pengembangan Pariwisata	1. <i>Attractions</i> (daya tarik) 2. <i>Accessibility</i> (Aksesibilitas) 3. <i>Accommodation</i> (Akomodasi) 4. <i>Amenities</i> (Amenitas) 5. <i>Ancillary Service</i> (Pelayanan Tambahan)	1. Mengidentifikasi daya tarik terhadap pariwisata 2. Mengidentifikasi akses penunjang pariwisata 3. Mengidentifikasi sarana penginapan yang nyaman dan aman 4. Mengidentifikasi fasilitas layanan penunjang wisatawan 5. Membangun sikap masyarakat untuk ramah dengan wisatawan

Proses Analisis Kebijakan		
Merumuskan masalah kebijakan	1. Perangkat keras (hardware) 2. Perangkat Lunak (Software) 3. Manusia Pelakunya (brainware)	1. Identifikasi substansi permasalahan dari kondisi tempat wisata sarana prasarana, 2. Identifikasi dari sisi aturan, nilai dan norma 3. Identifikasi dari sisi SDM baik pihak ketiga maupun pelaku kebijakan dan plaksana kebijakan.
Menentukan tujuan dan sasaran kebijakan	Menyediakan berbagai pilihan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari sebuah proposal kebijakan	Penentuan tujuan dan sasaran akan menentukan panduan, arah tindakan dalam implementasi kebijakan.
Mengidentifikasi parameter.	1. <i>Technical feasibility.</i> 2. <i>Political viability.</i> 3. <i>Economic and finansial possibility.</i> 4. <i>Administrative operability.</i> 5. <i>Environment commitment.</i>	1. Mengukur tujuan kebijakan 2. Mengukur dampak kebijakan (akseptabilitas, ketepatan, kepekaan, dukungan hukum, dan keadilan) 3. Mengukur biaya dan manfaat ekonomi kebijakan 4. Mengukur kewenangan, komitmen kelembagaan, kemampuan, dan dukungan dalam monteks politik, social dan administrasi birokrasi 5. Mengukur komitmen pada lingkungan (dampak lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan Lembaga pengendali dampak lingkungan)
Mencari alternatif-alternatif	<i>Method Scoring</i>	1. Mengumpulkan data pendukung 2. Mengumpulkan informasi yang relevan 3. Mengidentifikasi berbagai respon atau tanggapan Melakukan scoring kepada alternatif pemecahan masalah
Memutuskan alternatif pilihan mana yang sebaiknya dilakukan	1. Penyajian Alternatif Kebijakan 2. Membuat langkah-langkah terhadap alternatif kebijakan terpilih 3. Membuat langkah-langkah implementasi	1. Memutuskan alternatif kebijakan dari hasil scoring kemudian memberikan penilaian dari yang tertinggi hingga terendah 2. Memberikan saran kepada pemerintah dari hasil rekomendasi

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022